



LAPORAN KINERJA

BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2023 tepat pada waktunya. Dokumen Laporan Capaian Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program layanan pengujian pendidikan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel.

Laporan Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan diharapkan mampu memberikan gambaran obyektif mengenai pencapaian yang telah dilakukan serta membantu dalam proses proses langkah-langkah ke depan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang teridentifikasi selama tahun tersebut.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang layanan pengujian pendidikan, serta menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Rahmawati, M.Ed.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	2
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	6
1. Isu-Isu Strategis	6
2. Peran Strategis Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Visi	8
B. Misi	8
C. Tujuan Strategis	9
1. Sasaran Kegiatan: Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	11
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	13
3. Aspek Teknis Layanan BLU	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	15
1. Sasaran Kegiatan: Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	15
2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	25
3. Aspek Teknis Layanan BLU	26
B. Realisasi anggaran	37
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Kolaborasi/Crosscutting	39
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	44
LAMPIRAN-1: Perjanjian Kinerja	44

LAMPIRAN-2: Kontrak Kinerja BLU.....	47
LAMPIRAN-3: Pengukuran Kinerja.....	55
LAMPIRAN-4: Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	x
Tabel 2. Matriks target kinerja BPPP dalam pemenuhan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbudristek	9
Tabel 3. Matriks target kinerja BPPP dalam pemenuhan Kontrak Kinerja dengan Kementerian Keuangan	10
Tabel 4. Definisi operasional sesuai Renstra BPPP	11
Tabel 5. Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Ujian yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	22
Tabel 6. Jumlah Peserta Ujian yang dilayani oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	27
Tabel 7. Jumlah mitra yang mendapat layanan pengujian oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	27
Tabel 8. Nilai Kepuasan Layanan terhadap pelaksanaan SNBT	29
Tabel 9. Matriks pembiayaan pada biaya operasional dari pembiayaan RM APBN dan PNBPN BLU	32
Tabel 10. Matriks capaian layanan BPPP dalam tahapan dan komponen yang dilaksanakan	33
Tabel 11. Perbandingan Harga Satuan Output Kegiatan	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar.....	vii
Grafik 2. Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen.....	viii
Grafik 3. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.....	viii
Grafik 4. Jumlah peserta pengujian yang mendapat layanan asesmen terstandar oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.....	ix
Grafik 5. Jumlah mitra yang mendapat layanan asesmen terstandar oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.....	ix
Grafik 6. Komposisi komponen survey berdasarkan gender.....	x
Grafik 7. Realisasi pendapaan layanan BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (dalam Milyar).....	xi
Grafik 8. Rasio pendapatan BLU terhaap biaya operasional Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.....	xii
Grafik 9. Modernisasi pengelolaan BLU yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.....	xii
Grafik 10. SOP yang telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.....	xiii
Grafik 11. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.....	xiii
Grafik 12. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	5
Grafik 13. Komposisi Pegawai Berdasarkan Waktu Bergabung.....	6
Grafik 14. Peserta SNBP tahun 2022 dan tahun 2023.....	17
Grafik 15. Akumulasi Data Keluhan yang Diterima SNPMB.....	28
Grafik 16. Pendapatan pada layanan BLU BPPP (dalam Milyar).....	31
Grafik 17. Capaian Indikator Sasaran Kinerja 1.....	40
Grafik 18. Capaian Indikator Sasaran Kinerja 1.....	41
Grafik 19. Capaian Kontrak Kerja Aspek Teknis Layanan.....	42
Grafik 20. Capaian Kontrak Kerja Aspek Keuangan dan Tata Kelola.....	42

DAFTAR GAMBAR

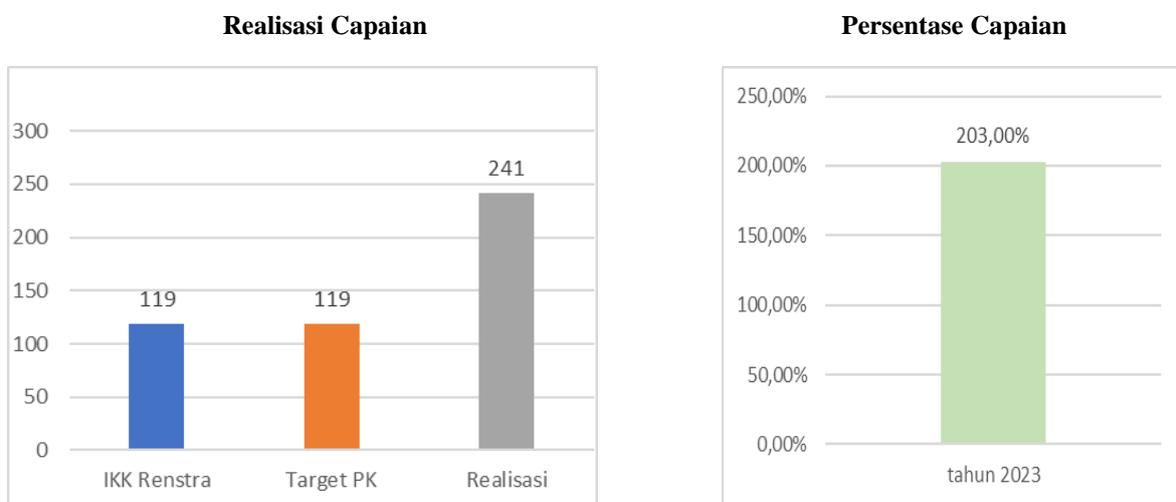
Gambar 1. Linimasa Pembentukan BPPP.....	1
Gambar 2. Struktur Organisasi BLU BPPP	5
Gambar 3. Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT dalam peta Indonesia	18
Gambar 4. Jumlah Satuan Pendidikan dan Jumlah Peserta Didik yang mendapatkan layanan Asesmen Bakat Minat oleh BPPP	19
Gambar 5. Tampilan laman Helpdesk dan Call Center SNPMB	28

IKHTISAR EKSEKUTIF

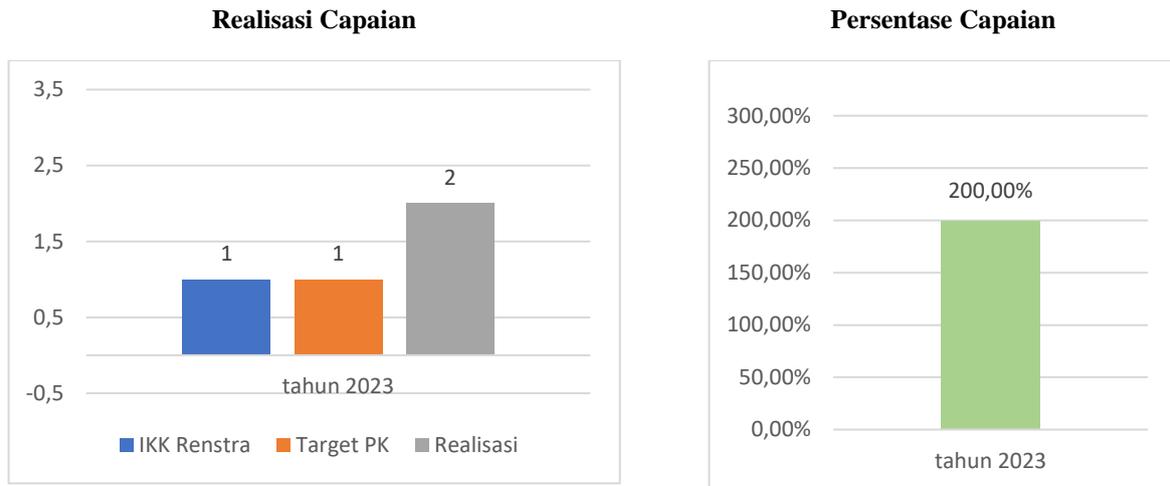
Laporan kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kemendikbudristek tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Mengingat Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan merupakan Badan Layanan Umum (BLU), maka dalam laporan kinerja ini juga akan disampaikan capaian dua sasaran strategis beserta 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU BLU). Tingkat ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN: Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), antara lain:

Grafik 1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar

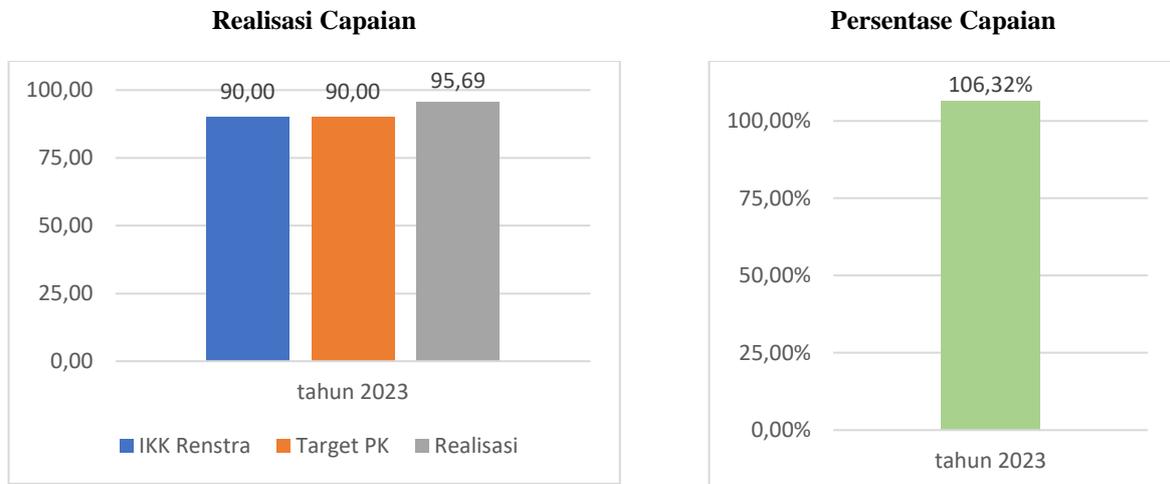


Grafik 2. Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen



SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dengan indikator kinerja:

Grafik 3. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



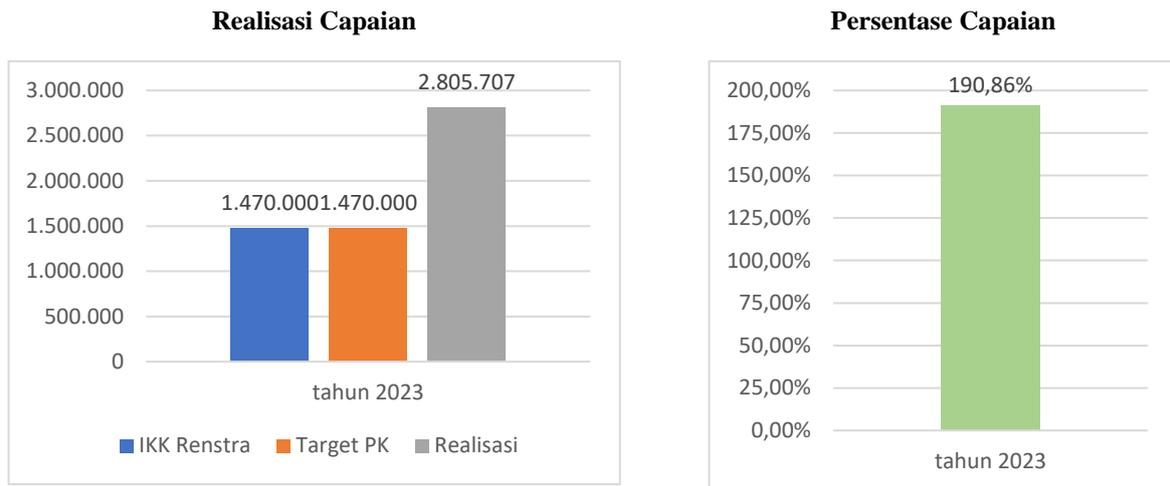
Adapun capaian sebagai BLU dengan sasaran yang tertera dalam Kontrak Kinerja tahun 2023 sebagai berikut.

ASPEK KINERJA: Teknis Layanan

Dengan indikator kinerja

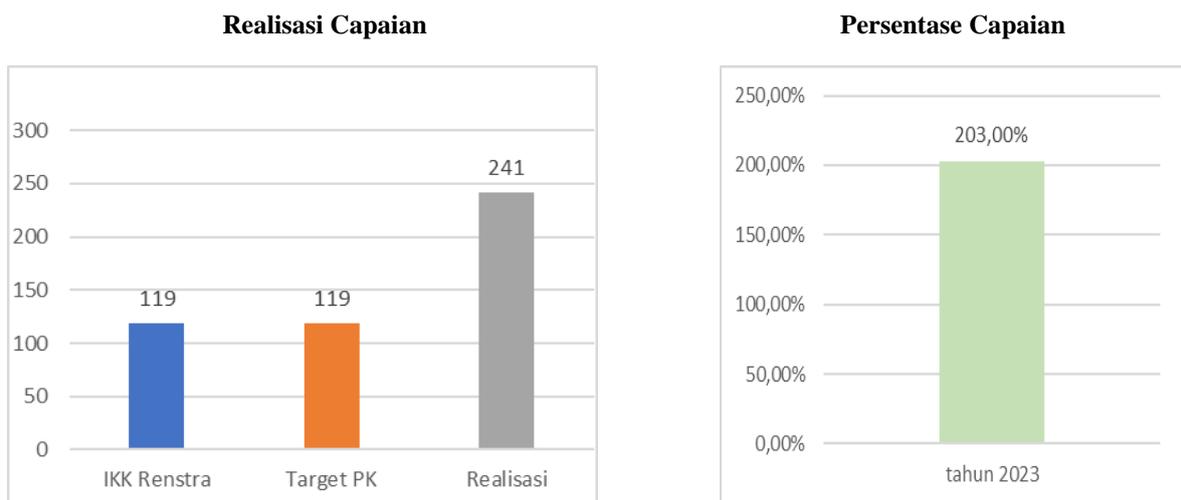
1. Realisasi jumlah peserta pengujian pendidikan

Grafik 4. Jumlah peserta pengujian yang mendapat layanan asesmen terstandar oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



2. Realisasi jumlah mitra layanan pengujian pendidikan

Grafik 5. Jumlah mitra yang mendapat layanan asesmen terstandar oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

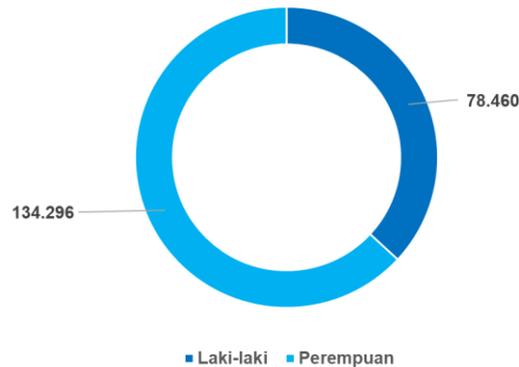


3. Indeks kepuasan pengguna layanan

BPPP juga melakukan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan kegiatan layanan SNBT - UTBK dilaksanakan dan diberikan kepada peserta SNBT - UTBK sesaat setelah ujian. Pada survei diaring penilaian terhadap sejumlah aspek layanan, yaitu:

Grafik 6. Komposisi komponen survey berdasarkan gender

Komposisi Responden : Peserta UTBK-SNBT 2023



Tabel 1. Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

No	Komponen Penilaian Kepuasan	Nilai
1.	Sosialisasi dan promosi seputar UTBK-SNBT	89,38
2.	Materi sosialisasi dan promosi UTBK-SNBT	85,80
3.	Frekuensi sosialisasi dan promosi tentang UTBK-SNBT	79,77
4.	Informasi UTBK-SNBT melalui media sosial SNPMB	88,95
5.	Informasi lokasi tempat menempuh UTBK-SNBT	90,23
6.	Informasi waktu untuk mengikuti UTBK-SNBT	91,20
7.	Informasi mengenai persyaratan dan perlengkapan yang harus/boleh dibawa untuk mengikuti UTBK-SNBT	90,83

8.	Informasi lengkap mengenai prosedur cetak kartu kembali/ulang untuk mengikuti UTBK-SNBT	89,62
9.	Tampilan di layar monitor	92,76
10.	Keterbacaan soal ujian	92,48

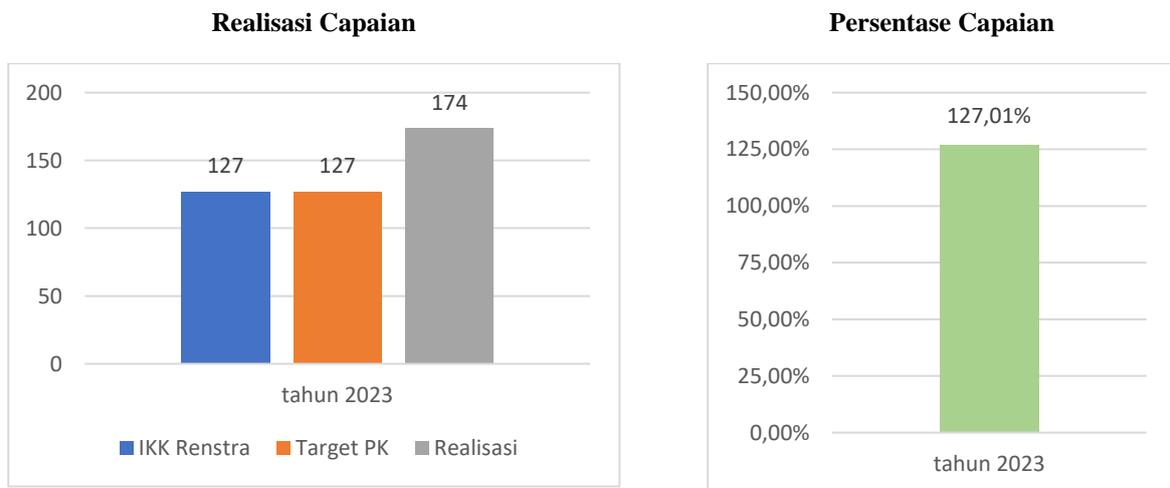
Berdasarkan tabel tersebut, dari skala 0-100%, lebih dari 89% pelanggan puas dengan beragam aspek layanan SNBT - UTBK. Baik dari sisi informasi yang diterima maupun sistem yang digunakan untuk layanan.

ASPEK KINERJA: Keuangan dan Tata Kelola

Dengan indikator kinerja

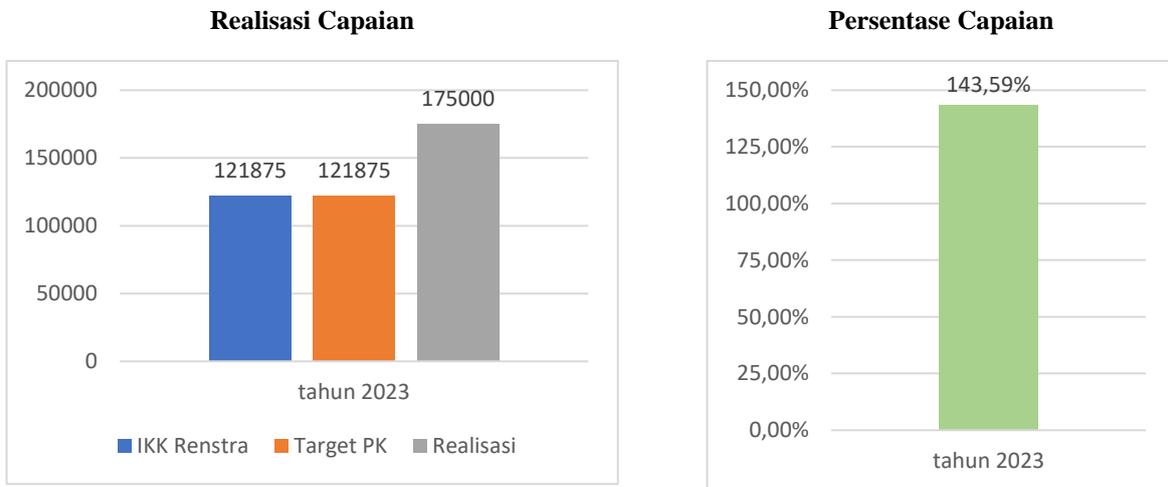
1. Realisasi pendapatan Layanan BLU

Grafik 7. Realisasi pendapaan layanan BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (dalam Milyar)



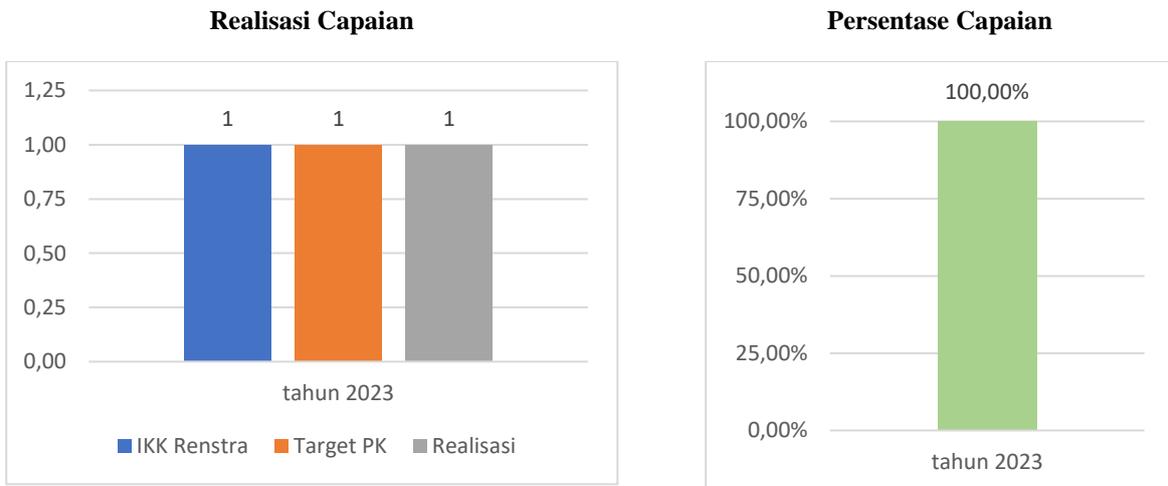
2. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional

Grafik 8. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



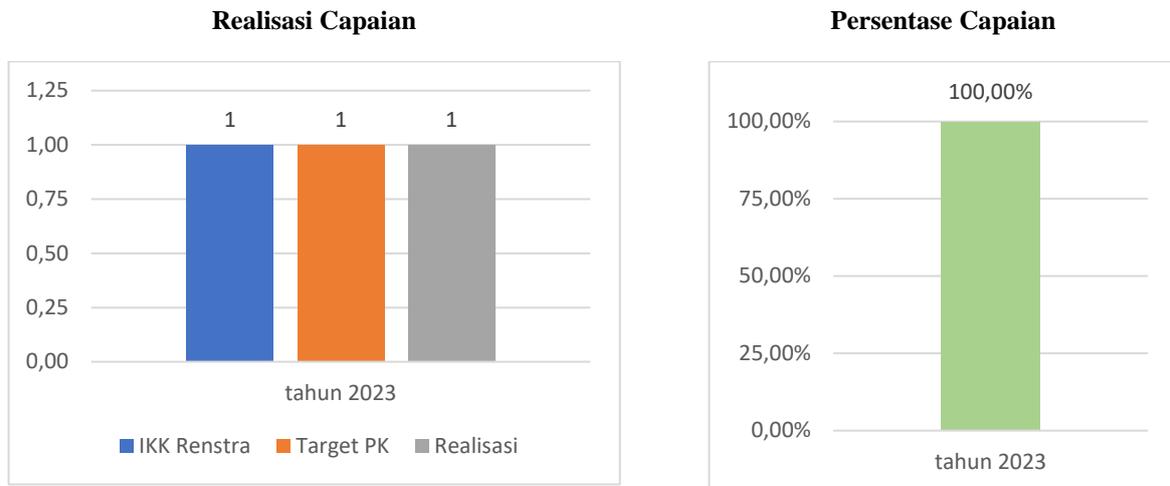
3. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Grafik 9. Modernisasi pengelolaan BLU yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



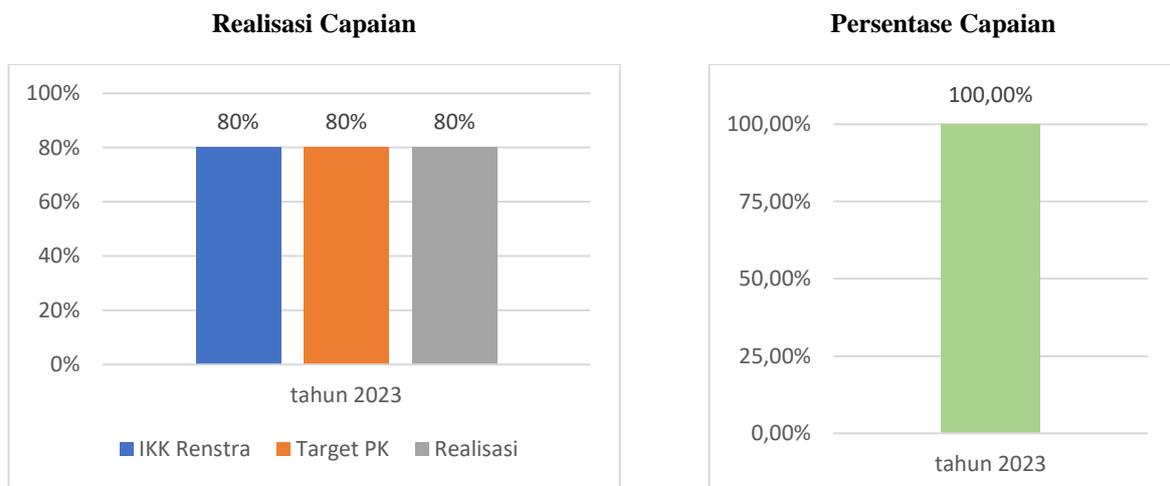
4. Persentase Penetapan SOP BPPP

Grafik 10. SOP yang telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



5. Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Grafik 11. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Blokir Anggaran 2023 pada komponen yang kritikal untuk pelayanan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru
2. SDM BPPP yang jumlahnya sangat terbatas untuk dapat melaksanakan pengelolaan program dan anggaran kegiatan prioritas nasional
3. Keterbatasan pemahaman tata kelola keuangan satuan kerja BLU

4. Kemitraan dengan PTN yang merupakan jejaring baru di lingkup BSKAP

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain.

1. Pengajuan SBML sebagai data dukung utama untuk pembukaan blokir anggaran 2023.
2. Pembentukan tim kerja yang melibatkan SDM dari satuan kerja lainnya pada berbagai kegiatan.
3. Pendampingan dari Direktorat PPK BLU dan satuan kerja lain yang berpengalaman melaksanakan tata kelola BLU
4. Kemitraan Direktorat jenderal Diktiristek dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menjembatani kemitraan dengan PTN

BAB I PENDAHULUAN

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang selanjutnya disebut BPPP adalah satuan kerja di bawah Pusat Asesmen Pendidikan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang diharapkan dapat mendorong percepatan perwujudan visi, misi, dan sasaran strategis pembangunan pendidikan dalam ranah pengujian untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Satuan kerja ini lahir sebagai salah satu wujud transformasi kelembagaan dalam lingkungan organisasi Kemendikbud Ristek yang diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola seleksi masuk perguruan tinggi yang sebelumnya diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) serta pelayanan pengujian kepada masyarakat yang dilakukan secara terbatas oleh Pusat Asesmen Pendidikan.

BPPP mendapatkan pengesahan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No.85/KMK/2023 tanggal 8 Maret 2023. Diharapkan dengan menerapkan pengelolaan keuangan BLU, BPPP dapat meningkatkan pelayanan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan pengujian pendidikan yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel.

Berikut lini masa periode pembentukan dan rencana kerja BPPP ke depan.



Gambar 1. Linimasa Pembentukan BPPP

A. Gambaran Umum

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam laporan kinerja yang bertujuan untuk menyampaikan kinerja dan capaian pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan BPPP sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Pengujian Pendidikan tahun 2023-2028. Laporan Kinerja BPPP tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP pada tahun 2023 dalam penyelenggaraan layanan pengujian pendidikan yang meliputi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Asesmen Bakat dan Minat (ABM), Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG), serta kegiatan pengujian pendidikan lainnya.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi keberadaan BLU BPPP diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

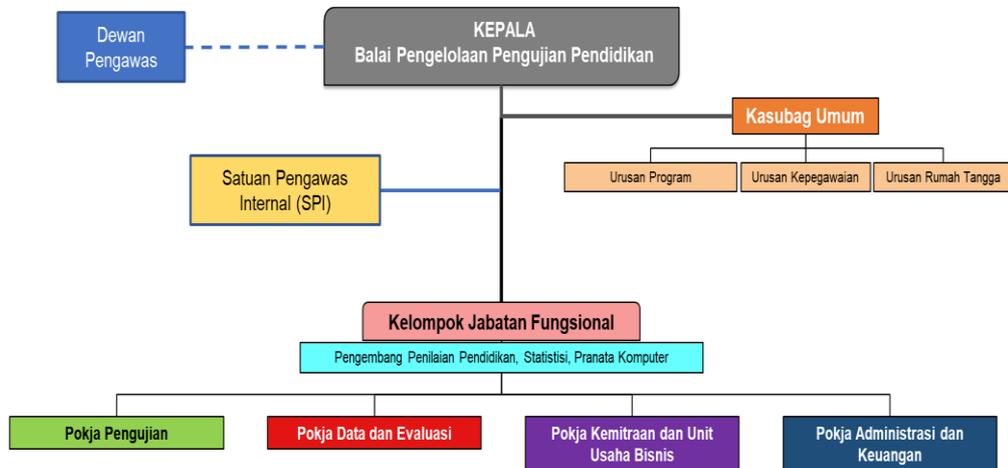
Berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2022, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Tugas Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan adalah “Melaksanakan Pengelolaan Pengujian Pendidikan”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyusunan teknik dan metode pengujian di bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan layanan pengujian di bidang pendidikan;
4. Pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan kemitraan pengujian di bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Sebagai upaya untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi dapat terselenggarakan dengan baik, BPPP menetapkan struktur organisasi sebagai berikut.

PMK no 129 Tahun 2020

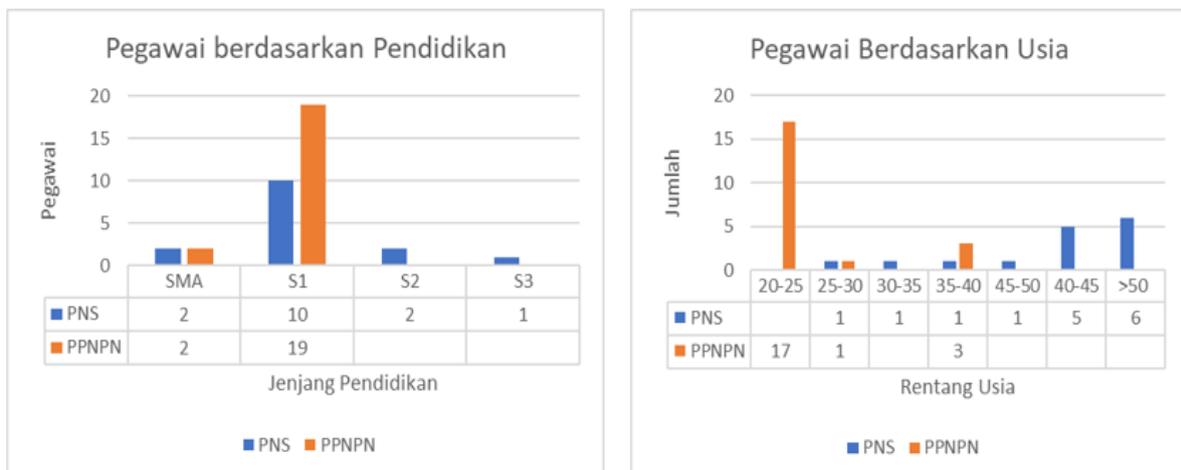


Gambar 2. Struktur Organisasi BLU BPPP

Gambaran Umum Pegawai

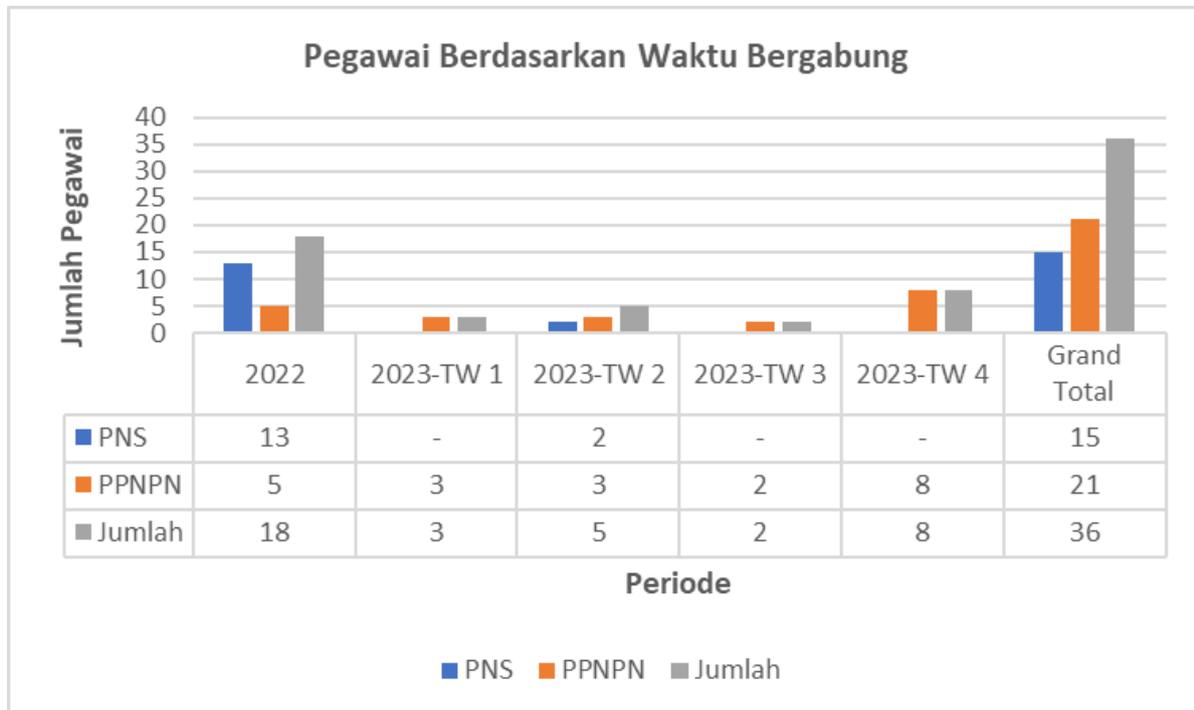
Jumlah pegawai BPPP pada akhir Desember 2023 sebanyak 36 orang yang terdiri atas 15 PNS dan 21 PPNPN, dengan mayoritas pendidikan dari pegawai adalah S1 dari berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan rentang usianya, pegawai BPPP sebagian besar didominasi dengan usia muda yaitu usia 20-25 tahun.

Grafik 12. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Sebagai satuan kerja yang baru terbentuk pada September 2022, BPPP pada awal tahun 2023 hanya memiliki 18 pegawai, dan triwulan 1 sampai dengan 4 memiliki penambahan 18 pegawai yang didominasi status sebagai PPNPN dalam membantu pelaksanaan program.

Grafik 13. Komposisi Pegawai Berdasarkan Waktu Bergabung



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP pada tahun pertama ini terdapat beberapa isu strategis dan permasalahan yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Isu-Isu Strategis

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah proses seleksi yang sangat kompetitif dan berdampak pada jalan karir individu peserta didik. Oleh karena itu layanan pengujian yang berkualitas, kredibel dan akuntabel menjadi mutlak untuk memastikan tidak ada keterlambatan, kesalahan, bias, maupun kecurangan.
2. seleksi masuk PTN dikenakan tarif kepada masyarakat. Dana PNBP yang terkumpul setiap tahunnya berjumlah besar. Tata kelola anggaran perlu dipastikan efisien dan efektif, dikembalikan seoptimal mungkin untuk peningkatan layanan.

3. Penuntasan sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan merupakan kebijakan yang perlu menyeimbangkan antara kualitas guru dengan kelayakan penghasilan guru. Oleh karena itu layanan pengujian kelulusan program PPG dalam jabatan perlu menitikberatkan pada pengukuran kompetensi yang relevan bagi guru yang sudah mengajar dengan pengalaman bertahun-tahun dan dikaitkan dengan program pengembangan profesi berkelanjutan.

2. Peran Strategis Organisasi

1. BPPP diberikan amanah untuk mengawal transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN. transformasi ini meliputi target pengujian yang menggabungkan program sarjana dengan diploma empat dan diploma tiga. transformasi lainnya adalah substansi pengujian yang bersifat holistik dan lebih mengukur kepada penalaran dibandingkan dengan pengetahuan. transformasi ketiga adalah semangat memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan karir pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya.
2. BPPP dibentuk dengan tujuan melaksanakan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, efisien dan efektif. temuan BPK berulang terhadap kepanitiaan nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2019-2021 merekomendasikan dibentuknya satuan kerja yang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran. sehingga penggunaan anggaran lebih terpantau dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
3. BPPP bersama panitia nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru memformulasikan profil lulusan ppg dalam jabatan yang mengedepankan pengukuran kemampuan pedagogik. Kompetensi profesional berupa pengetahuan substansi dikuatkan melalui berbagai program sebagai bagian dari pengembangan profesi berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi



B. Misi

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan tugas BPPP berupa pengelolaan pengujian pendidikan, BPPP mempunyai visi “Unggul dalam Bidang Pengujian Pendidikan yang Kredibel dan Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, BPPP menetapkan misi sebagai berikut.

1. Melaksanakan pengujian (tes) yang kredibel untuk uji kompetensi dan seleksi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan pengujian (tes) yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
3. Melakukan pengolahan, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian (tes) secara objektif.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengujian (tes) melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Dengan merujuk pada fokus pelayanan prima dan visi serta misi tersebut maka prinsip kerja yang diusung BPPP dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kewajaran.

C. Tujuan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Ristek 2022-2024 dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022, sasaran kegiatan BPPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Asesmen Pendidikan memiliki dua Sasaran Kegiatan (SK) dan masing-masing sasaran tersebut diukur melalui satu atau beberapa parameter/indikator pengukuran, yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada level IKK ini, capaian output secara dievaluasi secara berkala dan dilaporkan dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN) Kemendikbud Ristek. Guna mengukur ketercapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPP, dibuat perencanaan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Gambaran lebih jelas terkait target kinerja BPPP dalam pemenuhan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbudristek dapat dijelaskan melalui matriks berikut.

Tabel 2. Matriks target kinerja BPPP dalam pemenuhan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbudristek

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK
SK 1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	IKK 1.1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	119 lembaga
	IKK 1.2. Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	1
SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	90

Sasaran Kinerja BPPP sesuai dengan Indikator kinerja yang tercantum pada rencana strategis BPPP tahun 2023. Sementara itu, sebagai salah satu Satuan Kerja yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), BPPP juga bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan melalui Kontrak Kinerja dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nomor PRJ-270/230/2023 dan 713/H4.1/KU/III/2023. Kontrak Kinerja ini meliputi struktur atau hirarki kinerja berupa Aspek, Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter pengukuran, beserta volume targetnya. Adapun

gambaran lebih jelas terkait target kinerja BPPP dalam pemenuhan Kontrak Kinerja dengan Kementerian Keuangan dapat dijelaskan melalui matriks berikut:

Tabel 3. Matriks target kinerja BPPP dalam pemenuhan Kontrak Kinerja dengan Kementerian Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU
Aspek 1 Aspek Teknis Layanan	IKU 1.1. Realisasi jumlah peserta pengujian pendidikan	1.470.000 orang
	IKU 1.2. Realisasi jumlah mitra layanan pengujian pendidikan	120 lembaga
	IKU 1.3. Indeks kepuasan pengguna layanan	3 (skala 1-4)
Aspek 2. Aspek Keuangan dan Tata Kelola	IKU 2.1. Realisasi Pendapatan Layanan BLU	Rp121.875.000.000
	IKU 2.2. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional	65%
	IKU 2.3. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
	IKU 2.4. Persentase Penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	100%
	IKU 2.5. Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	80%

Guna mendukung pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp 235.585.533.000,- . Setelah dilakukan revisi terakhir pada tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor Revisi DIPA: SP DIPA- 023.11.2.690632/2023, besar anggaran tidak berubah. Anggaran tersebut dialokasikan dalam kegiatan “Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan” sebesar Rp Rp. 235.585.533.000,- dan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud” sebesar Rp 6.080.000.000,-. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pengujian pendidikan dalam bentuk Seleksi Nasional

Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Asesmen Bakat dan Minat (ABM), Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG), serta kegiatan pengujian pendidikan lainnya. Untuk mengawal pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan tahun 2023 (lihat Lampiran 1).

1. Sasaran Kegiatan: Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

Kegiatan Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan bertujuan untuk menyediakan informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan guna mendukung capaian Indikator Kinerja Program Kemendikbud Ristek (IKP 2.2.4) berupa peningkatan persentase satuan pendidikan yang terpetakan kompetensinya. Dalam Renstra BPPP, kinerja pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- a. IKK 1.1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas, dengan target 119 satuan pendidikan
- b. IKK 1.2. Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen, dengan target 1 dokumen

Dalam menghitung jumlah sasaran output dari Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditentukan, diperlukan adanya definisi operasional yang melekat pada objek pengukuran, agar menghindari ambiguitas atau multitafsir dari sisi cara menghitung. Berikut ini definisi operasional sesuai Renstra BPPP (yang menginduk pada definisi operasional Renstra Pusat Asesmen Pendidikan) terkait kedua IKK tersebut. (Poin-poin penting yang relevan dengan BPPP dicetak tebal):

Tabel 4. Definisi operasional sesuai Renstra BPPP

IKK 1.1	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas
Definisi Operasional	Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas meliputi satuan pendidikan pada seluruh jenjang (anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi), meliputi PAUD, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, serta Perguruan Tinggi yang mampu menerapkan asesmen berbasis komputer. Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang

	<p>berkualitas adalah satuan pendidikan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdaftar dalam sistem pendataan satuan pendidikan pelaksana asesmen berbasis komputer. • Mengikuti tahapan persiapan teknis pelaksanaan asesmen berbasis komputer. • Melaksanakan asesmen berbasis komputer sesuai dengan prosedur operasional standar. • Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
IKK 1.2	Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen
Definisi Operasional	<p>Rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen merupakan dokumen rekomendasi kebijakan terhadap hasil asesmen terstandar yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Ruang lingkup sasaran meliputi hasil asesmen kompetensi minimum, hasil survei karakter, hasil survei lingkungan belajar; hasil survei nasional dan internasional; dan hasil survei nasional lainnya serta hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Rekomendasi bahan kebijakan disusun berlandaskan bukti yang diperoleh melalui pengukuran menggunakan asesmen terstandar, yang mencakup berbagai wilayah dan jenjang pendidikan di Indonesia.</p> <p>Rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen ini digunakan untuk perbaikan pembelajaran dan pertimbangan penerimaan peserta seleksi.</p>

Target output untuk IKK 1.1. dan IKK 1.2. dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dengan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, dengan target sebagaimana tertera dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada lampiran 1. Untuk mencapai kegiatan Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan yang dilaksanakan di BPPP pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 235.585.533.000,-. Anggaran tersebut ditujukan untuk pencapaian kegiatan melalui 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu. (a) Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani [RO-1] dengan anggaran Rp.

233.702.263.000,-, dan (b) Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan [RO-2] dengan anggaran Rp. 1.883.270.000,-.

2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud bertujuan untuk peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) guna mendukung capaian Indikator Kinerja Program Kemendikbud Ristek (IKP 5.3.10) berupa peningkatan predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Dalam Renstra BPPP, kinerja pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Pada tahun 2023, IKK "Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan" ditargetkan nilai sebesar 90 poin.

Untuk mencapai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek yang dilaksanakan di BPPP pada tahun 2023, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.080.000.000,- yang dialokasikan melalui 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu (a) Layanan Umum [RO-1] dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,-, dan (b) Layanan Perkantoran [RO-2] dengan anggaran Rp. 5.080.000.000,-.

3. Aspek Teknis Layanan BLU

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis berupa pelayanan prima Badan Layanan Umum (BLU), BPPP selaku Satker BLU Kemendikbud Ristek memiliki ukuran keberhasilan kinerja terkait aspek teknis layanan yang berdampak langsung kepada pihak eksternal, antara lain: peserta pengujian pendidikan, mitra layanan pengujian pendidikan, serta tingkat kepuasan pengguna layanan BLU. Dampak kinerja terhadap pihak eksternal ini dituangkan ke dalam satuan volume yang dapat diukur, antara lain melalui perhitungan realisasi jumlah peserta pengujian pendidikan, jumlah mitra layanan pengujian pendidikan, dan indeks kepuasan pengguna layanan dalam skala tertentu.

Pada tahun 2023, Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani ditargetkan sebanyak 1.470.000 peserta. Sedangkan untuk mitra lembaga yang mendapatkan

layanan pengujian pendidikan ditargetkan sebanyak 120 lembaga. Target ini sejalan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1 Satuan Pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas yang diukur oleh Kemendikbud Ristek, namun terdapat perbedaan narasi pada BLU yang menggunakan entitas '**mitra lembaga**' untuk merepresentasikan satuan ukur yang dapat memberi dampak kinerja dan pendapatan terhadap BLU. Sementara itu, pada indikator berupa indeks kepuasan pengguna layanan, pada tahun 2023 ditargetkan pada skor 3 dalam skala 1-4.

4. Aspek Keuangan dan Tata Kelola BLU

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Badan Layanan Umum (BLU) yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, aspek keuangan dan tata kelola BLU juga diukur dalam hal peningkatan kinerja yang memberikan dampak terhadap kondisi internal Satker. Satker BLU yang diberikan wewenang untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya dalam menjamin keberlanjutan program. Hal ini dapat diukur melalui beberapa variabel pengukuran kinerja beserta volume target capaiannya antara lain: faktor realisasi pendapatan BLU (Rp121.875.000.000), faktor rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional (65%), faktor persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU (100%), faktor persentase penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (100%), dan faktor penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (80%).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan senantiasa terus berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dalam rangka merealisasikan tujuan dan pencapaian Sasaran Strategis yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Pengujian Pendidikan tahun 2023-2028.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun kedua sasaran strategis Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagai berikut.

1. Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud.

Pencapaian target kinerja dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan pencapaian sasaran strategis. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2023.

1. Sasaran Kegiatan: Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel, dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan. Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK). Berikut informasi ketercapaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2023.

a. IKK 1.1. Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas

Indikator kinerja ini mengukur realisasi jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pengujian pendidikan terstandar yang dilayani oleh BPPP. Berikut ini beberapa produk pengujian pendidikan terstandar dari BPPP dan dilaksanakan oleh sejumlah satuan pendidikan selama 2023.

1) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)

BPPP memiliki salah satu tugas yaitu menyelenggarakan SNPMB dengan dibantu Tim Pelaksana SNPMB yang dibentuk oleh Mendikbud Ristek, dengan tugas utama antara lain :

(a). untuk mempersiapkan dan mengelola, mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

(b) Melaksanakan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)

(c) Menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan.

SNBP dan SNBT pada umumnya bertujuan untuk menjaring dan menyeleksi calon mahasiswa baru yang berkualitas secara akademik dan diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, serta memberi peluang bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN secara lintas wilayah.

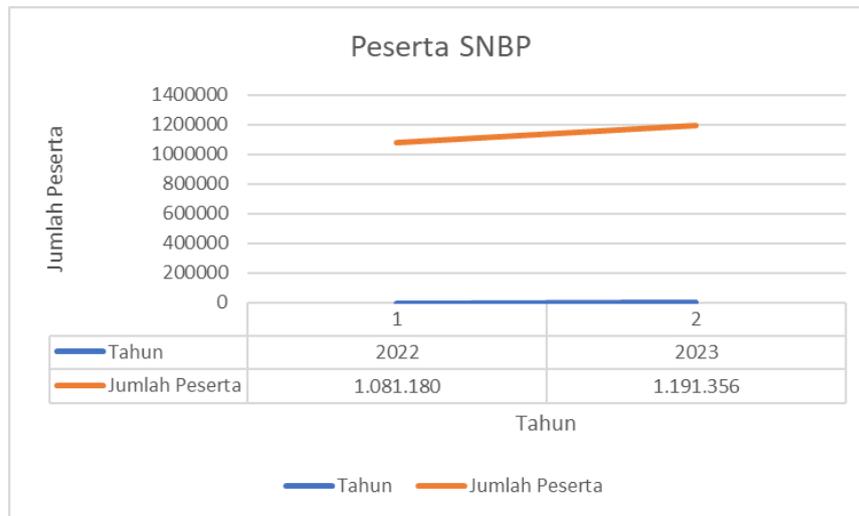
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)

SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi yang diselenggarakan oleh seluruh PTN Akademik dan PTN Vokasi dari seluruh Indonesia, secara terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan. Salah satu kriteria penilaian SNBP berdasarkan nilai akademik saja atau Nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.

Pembiayaan pelaksanaan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah melalui sumber dana Rupiah Murni (RM).

Total Peserta SNBP

Grafik 14. Peserta SNBP tahun 2022 dan tahun 2023



Pada pelaksanaan SNBP tahun 2023 mengalami kenaikan, yang sebelum terdaftar sebanyak 1.081.180 peserta menjadi 1.191.356 peserta. Jumlah peserta ini adalah total pendaftar pilihan pertama dan pendaftar pilihan kedua pada SNBP.

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

SNBT merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes (UTBK) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh PTN bersangkutan. SNBT diselenggarakan oleh seluruh PTN Akademik dan PTN Vokasi dari seluruh Indonesia, secara terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT dilakukan sebelum dan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas.

Tahapan SNBT meliputi pengembangan tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, penyediaan dokumen ujian, pelaksanaan UTBK, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan monitoring, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta pengkajian dan pengembangan.

Pembiayaan pelaksanaan SNBT menggunakan dana Rupiah Murni dan dana masyarakat. Tarif UTBK-SNBT sebesar Rp 200.000,- tertuang dalam PMK No.4/PMK.02/2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan SNPMB PTN yang Berlaku Pada Kemendikbudristek yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023. Selain itu, pelaksanaan ini juga diperuntukan bagi pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sesuai dengan pasal 2, besaran tarif seleksi nasional berdasarkan tes untuk perguruan tinggi negeri program diploma/ sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), bagi pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang:

- a. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- b. menerima program bantuan sosial, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Sebaran 74 Pusat UTBK



Gambar 3. Titik sebaran 74 Pusat UTBK-SNBT dalam peta Indonesia

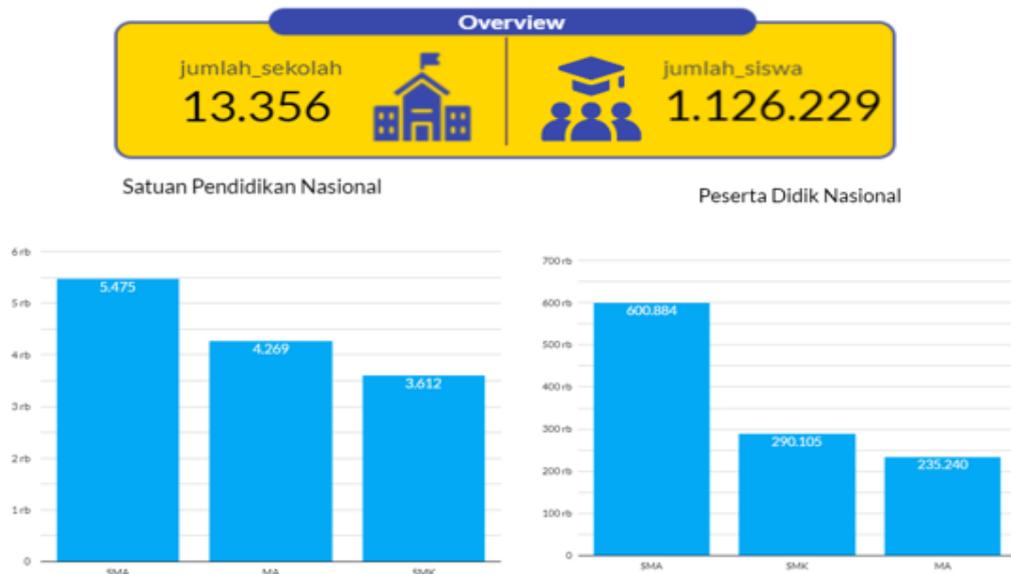
2) Asesmen Bakat dan Minat (ABM)

Asesmen Bakat dan Minat (ABM) merupakan asesmen untuk siswa kelas XII pada jenjang SMA sederajat, melalui moda CBT (Computer Base Test). Aspek yang diukur dalam ABM terdiri atas tes bakat yang mencakup kemampuan verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanik, klerikal, dan penggunaan bahasa. Selain itu dalam ABM juga mengukur rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas (minat) pada siswa, yang meliputi minat dasar,

minat metodelis, dan minat praktis. Terdapat delapan jenis minat dasar yang diukur pada asesmen ini, mencakup fasilitasi sosial, pengelolaan, detail bisnis, pengelolaan data, keteknikan, kerja lapangan, kesenian, dan menolong. ABM bertujuan memberikan informasi kepada siswa, sekolah, ataupun orang tua mengenai potensi siswa tersebut pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur sehingga diharapkan dapat membuat arah pengembangan dirinya secara lebih jelas dan terencana. Hasil ABM dimaksudkan untuk memberikan insight kepada siswa agar dapat memprediksi kemampuannya untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi baru.

Pembiayaan pelaksanaan ABM sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah melalui sumber dana Rupiah Murni (RM).

Pelaksanaan ABM di 38 provinsi di seluruh Indonesia selama bulan November 2023, dengan jumlah peserta sebagai berikut :



Gambar 4. Jumlah Satuan Pendidikan dan Jumlah Peserta Didik yang mendapatkan layanan Asesmen Bakat Minat oleh BPPP

3) Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG)

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sejak program sertifikasi guru dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 jumlah guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebanyak 1.275.486 guru dari 2.869.186 Guru (Dapodik 2021-2022). Artinya, masih ada sejumlah 1.593.700 guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

Salah satu upaya percepatan sertifikasi guru adalah melakukan fasilitasi terhadap lulusan perguruan tinggi yang akan mendaftar menjadi guru untuk mengikuti program pendidikan profesi PPG yang selanjutnya disebut dengan PPG Prajabatan. Selain daripada itu, pemerintah juga menyelenggarakan PPG bagi guru dalam jabatan yaitu guru guru aparatur sipil negara dan guru bukan aparatur sipil negara yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya program ini disebut dengan PPG Dalam Jabatan. Jadi, Program PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, baik dari kependidikan maupun non kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan PPG Dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Teknis pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022/23 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 4560/B/HK.03.01/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Sedangkan teknis pelaksanaan PPG

Dalam Jabatan diatur dalam beberapa peraturan Direktorat Jenderal, antara lain:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 2106/B/HK.06/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Belum Lulus Uji Tulis Nasional Atau Uji Kompetensi Pada Akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 2107/B/HK.06/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Telah Memiliki Pendidikan Guru Penggerak.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 2108/B/HK.06/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Diatas Tahun 2015.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek Nomor 2109/B/HK.06/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015.

PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Program ini dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu. Dalam PP 74 tahun 2008 yang disempurnakan dengan PP No.19 Tahun 2017, pasal 9 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang terdiri atas uji tertulis dan uji kinerja. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, para mahasiswa PPG harus lulus dari ujian kompetensi tersebut. Selanjutnya program ini disebut dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG).

- 4) Kegiatan pengujian pendidikan lainnya, antara lain:
 - a) Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Pariwisata (6 Politeknik)
 - b) Penyiapan instrumen seleksi taruna, tamtama, bintanga Kepolisian Republik Indonesia
 - c) Penyiapan instrumen seleksi taruna akademi militer TNI Angkatan Darat

Adapun jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pengujian pendidikan terstandar selama tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Ujian yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

No	Nama Layanan Pengujian	Jumlah Satuan Pendidikan pelaksana
1	Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)	119
2	Asesmen Bakat Minat (ABM)	13.356*)
3	Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG)	122
4	Kegiatan pengujian Pendidikan lainnya	6*)

*) tidak dihitung sebagai capaian Renstra merujuk pada definisi operasional

Berdasarkan hasil tersebut, maka capaian indikator sepanjang tahun 2023 sebesar 241 satuan pendidikan atau setara dengan 202,52% dari target Renstra.

b. IKK 1.2. Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan

Indikator kinerja ini mengukur realisasi jumlah dokumen bahan rekomendasi kebijakan hasil asesmen pendidikan yang telah disusun oleh BPPP. Adapun dokumen bahan rekomendasi kebijakan hasil asesmen pendidikan yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Kajian Layanan Pendidikan Profesi Guru
- 2) Kajian Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru

Secara keseluruhan capaian indikator sepanjang tahun 2023 sebesar 2 (dua) dokumen bahan kebijakan, setara dengan 200% dari target DIPA, atau 200%

dari target Renstra. Realisasi capaian tersebut didukung dengan serapan anggaran sebesar Rp. 223.918.536.671,- atau setara dengan 97,19 % dari pagu DIPA sebesar Rp. 241.665.533.000,-

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain.

- 1) Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan layanan pengujian pendidikan
- 2) BPPP berada di dalam struktur BSKAP sedangkan mitra utama adalah PTN yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Perbedaan ruang lingkup serta hirarki struktur organisasi menjadi tantangan saat pemberian penugasan.
- 3) Tenggat waktu yang terbatas antara satu layanan ke layanan lainnya, sehingga kurang ideal dalam proses persiapan pengujian dengan skala besar.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain.

- 1) Berkolaborasi dengan Pusat Asesmen Pendidikan untuk mendukung SDM teknis dan substansi
- 2) Pelibatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk melakukan koordinasi kemitraan dengan Perguruan Tinggi Negeri
- 3) Penjadwalan ujian yang disusun dan diterapkan pada awal tahun dan pengelompokan jenis layanan yang serupa untuk dapat dikelola dalam waktu bersamaan, sehingga interval waktu antar layanan menjadi lebih panjang.

Berdasarkan hasil kajian atas data UKMPPG Daljab tahun 2022/23 direkomendasikan, beberapa hal :

UKM PPG Prajabatan

- Perlu diinformasikan kepada Perguruan Tinggi yang menghasilkan sarjana untuk jenjang Pendidikan PAUD dan BK, bahwa pada umumnya peserta dari kedua kelompok ini terjadi ketidaklulusan tertinggi di UKM PPG Prajabatan. Oleh karena itu, harus diberi masukan atas hasil kajian ini kepada Perguruan Tinggi penyelenggara agar dapat meningkatkan dan memperbaiki mutu lulusan pada kedua bidang tersebut.
- Seleksi dan pelatihan pada penilai/asesor terhadap penilai uji studi kasus dan uji kinerja perlu ditingkatkan agar tidak terjadi gap penilaian secara signifikan.

UKM PPG Dalam Jabatan

- Penilaian terhadap portofolio perlu ditinjau ulang mengingat subjektivitas penilai sangat besar. Jika tetap dipertahankan maka perlu rubrik yang lebih jelas dan sosialisasi pemahaman kedua penilai portofolio harus diperdalam
- Sosialisasi/pelatihan bagi penilai terhadap pemahaman rubrik penilaian RPP dan PP diperbaiki agar konsistensi kedua penilai lebih meningkat.
- Perlu dirancang lebih baik program PPG Daljab serta pendekatannya untuk meningkatkan tingkat kelulusan UKMPPG Daljab. Lebih khusus lagi bagi guru peserta PPG Daljab dari daerah 3T, daerah khusus dan dari Indonesia Timur

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut informasi ketercapaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2023.

a. IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Indikator kinerja ini mengukur perolehan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang dilaksanakan oleh BPPP. Adapun pengukuran indikator kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun capaian perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPPP pada tahun 2023 sebesar 95.69 poin atau setara dengan 106,32% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Realisasi capaian tersebut didukung dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.324.253.304,- atau setara dengan 87,57% dari pagu DIPA sebesar Rp. 6.080.000.000,-.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain.

- 1) Proses pencatatan penerimaan, pengesahan pendapatan dan pengesahan pengeluaran PNBPN yang masih dilakukan secara manual.
- 2) Jumlah kontrak kerja sama dengan mitra pelaksana layanan yang sangat banyak.
- 3) Pembuatan kontrak baru untuk setiap periode ujian, hal ini menyebabkan volume verifikasi dan validasi dokumen kontrak yang sangat banyak

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- 1) Rencana perjanjian kerja sama yang telah dipersiapkan pada pertengahan Desember di tahun sebelumnya, sehingga pada bulan Januari sudah siap ditandatangani dan tidak terkendala saat pengajuan pencairan dana

- 2) Sistem pencatatan pendapatan dan pengeluaran BLU masih dilakukan secara manual sehingga belum tersedia dashboard yang menyajikan data secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tahun 2024 akan melakukan benchmark dan mengadopsi sistem keuangan yang sudah teruji dan handal, modern serta terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari satuan kerja lain
- 3) Penyederhanaan mekanisme kontrak swakelola, dengan membuat kontrak payung untuk mengakomodir berbagai produk layanan pengujian dalam satu tahun periode kontrak (seperti contoh kontrak Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yang direncanakan pada tahun 2024 akan dilakukan sebanyak 4 tahap pelaksanaan, tetapi kontrak yang akan dipersiapkan langsung dalam 1 tahun periode, sementara pencairan setiap tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan timeline dan periode anggaran

3. Aspek Teknis Layanan BLU

a. IKU 1.1. Realisasi jumlah peserta pengujian pendidikan

Realisasi jumlah peserta perorangan masyarakat yang mendapatkan layanan atas kebutuhan pengujian pendidikan dan hasil ujian individu yang dilaksanakan berdasarkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dapat disajikan dalam tabel berikut

Tabel 6. Jumlah Peserta Ujian yang dilayani oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

No	Nama Layanan Pengujian	Jumlah Peserta
1	Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)	1.467.033
2	Asesmen Bakat Minat (ABM)	1.126.229
3	Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG)	212.455
4	Kegiatan pengujian Pendidikan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • Seleksi Taruna, Tamtama dan Bintara POLRI • Seleksi enam kampus Poltekpar • Seleksi Mabes TNI 	10 kemitraan
	Total	

Dengan demikian, realisasi jumlah peserta pengujian pendidikan telah melampaui target kontrak kinerja sebesar 190 %

b. IKU 1.2. Realisasi jumlah mitra layanan pengujian pendidikan

Realisasi jumlah mitra lembaga yang mendapatkan layanan pengujian pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan adanya PNBP BLU adalah sebagai berikut.

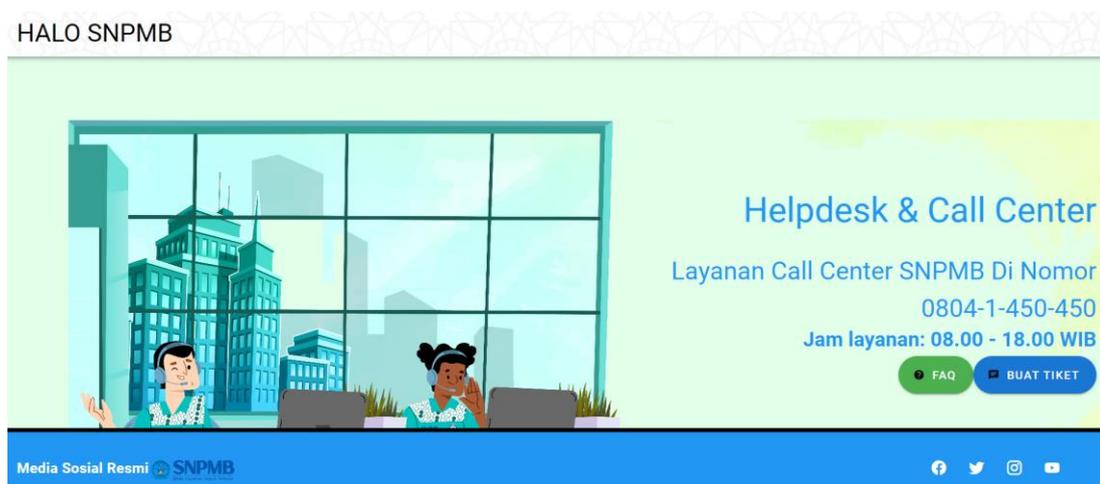
Tabel 7. Jumlah mitra yang mendapat layanan pengujian oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

No	Nama Layanan Pengujian (dengan pembiayaan PNBP BLU)	Jumlah Mitra Layanan
1	Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)	119
2	Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG)	132
	Total	222

Dengan demikian, realisasi jumlah mitra layanan pengujian pendidikan telah melampaui target kontrak kinerja sebesar 186 %

c. IKU 1.3. Indeks kepuasan pengguna layanan

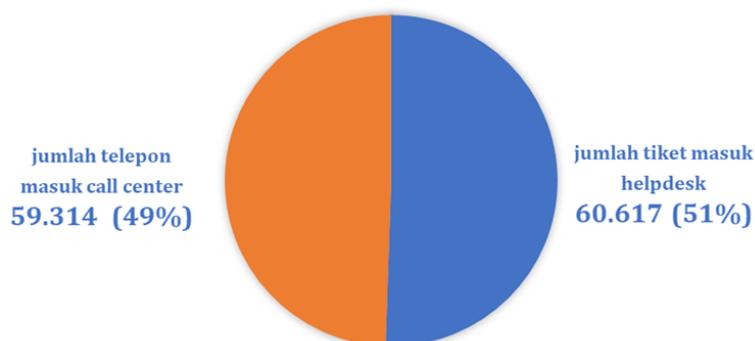
Layanan masyarakat pada pelaksanaan SNPMB melalui *Call Center*, *Helpdesk*, *e-mail*, dan juga dengan adanya layanan tatap muka SNPMB *Corner* yang berada di lantai lobi Gedung D Kemendikbud Ristek. Pada tahun 2023, layanan tersebut juga diberikan melalui laman *halo-spmb.bppp.kemdikbud.go.id*.



Gambar 5. Tampilan laman Helpdesk dan Call Center SNPMB

Berikut akumulasi data masalah dan keluhan yang diterima oleh Tim Sekretariat SNPMB selama proses seleksi SNBP dan UTBK-SNBT 2023.

Grafik 15. Akumulasi Data Keluhan yang Diterima SNPMB



Selama periode pelaksanaan SNBP dan SNBT 2023, dapat diidentifikasi beberapa informasi dan penyelesaian masalah yang diperlukan oleh masyarakat yang diterima oleh SNPMB. Permasalahan atau informasi tersebut antara lain (1) verifikasi data, (2) pengisian PDSS, (3) pelaksanaan SNBP (4)

pelaksanaan SNBT. Berikut pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat pada periode tertentu, yaitu :

Periode pengisian dan verifikasi PDSS

(1) kesulitan pada saat login sekolah; (2) kesulitan dalam meng-input data sekolah dan data siswa; (3) kesalahan dalam input data; dan (4) finalisasi.

Periode pendaftaran SNBP

(1) pertanyaan mengenai ketentuan eligibilitas siswa; (2) kendala saat login dan data siswa; (3) proses pemilihan prodi dan PTN; (4) pengunggahan dokumen prestasi dan portofolio; (5) finalisasi dan cetak kartu; (6) peserta KIP Kuliah; dan (7) permasalahan pasca pengumuman SNBP.

Periode pendaftaran UTBK-SNBT

(1) panduan pengisian dan pendaftaran UTBK-SNBT, (2) biodata peserta, (3) pemilihan prodi dan PTN, (4) unggah portofolio, (5) pemilihan Pusat UTBK, (6) pembayaran UTBK, (7) peserta KIP Kuliah, (8) finalisasi dan cetak kartu peserta, (9) pelaksanaan UTBK-SNBT, dan (10) informasi yang berhubungan dengan pasca pelaksanaan dan pengumuman hasil SNBT.

Meskipun tim dituntut untuk merespons berbagai pertanyaan masyarakat secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim yaitu keterbatasan data yang dimiliki sebagai bahan untuk dapat merespons pertanyaan masyarakat dengan cepat dan akurat. Solusi yang dilakukan, dengan berkomunikasi secara cepat pada bidang terkait serta diberikan data yang dibutuhkan untuk merespons pertanyaan dari masyarakat, sehingga secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan administrasi, tim *help desk* maupun tim *call center* SNPMB.

Selesai pelaksanaan SNBT, guna memenuhi Indeks kepuasan pengguna layanan, BPPP melakukan survey layanan terhadap pelaksanaan SNBT. Adapun instrumen survei dan realisasi yang menyajikan indeks kepuasan pengguna layanan dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Nilai Kepuasan Layanan terhadap pelaksanaan SNBT

No	Komponen Penilaian Kepuasan	Nilai
1.	Sosialisasi dan promosi seputar UTBK-SNBT	89,38
2.	Materi sosialisasi dan promosi UTBK-SNBT	85,80
3.	Frekuensi sosialisasi dan promosi tentang UTBK-SNBT	79,77
4.	Informasi UTBK-SNBT melalui media sosial SNPMB	88,95
5.	Informasi lokasi tempat menempuh UTBK-SNBT	90,23
6.	Informasi waktu untuk mengikuti UTBK-SNBT	91,20
7.	Informasi mengenai persyaratan dan perlengkapan yang harus/boleh dibawa untuk mengikuti UTBK-SNBT	90,83
8.	Informasi lengkap mengenai prosedur cetak kartu kembali/ulang untuk mengikuti UTBK-SNBT	89,62
9.	Tampilan di layar monitor	92,76
10.	Keterbacaan soal ujian	92,48
	Nilai (rata-rata)	89,00
	Mutu Pelayanan	A
	Predikat	Sangat Baik

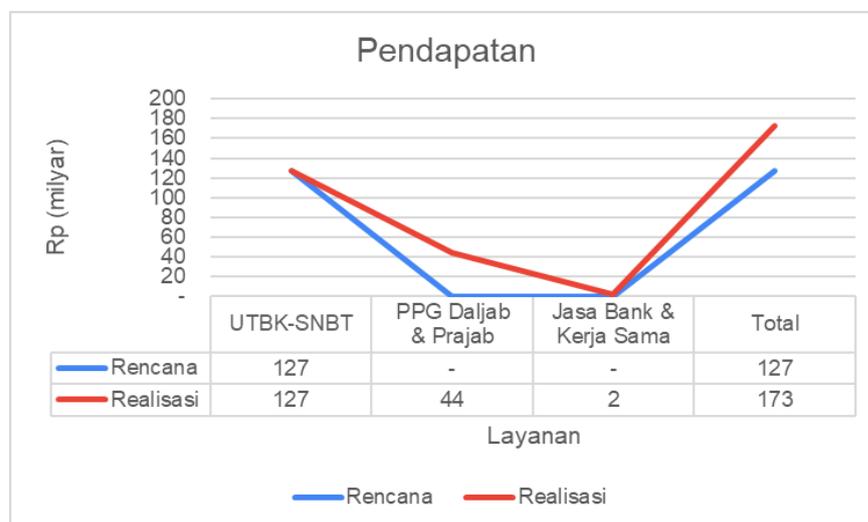
Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka dalam skala 1 (satu) sampai 4 (empat) yang memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, indeks kepuasan pengguna layanan pengujian pendidikan telah mencapai target kontrak kinerja yaitu 3 dari skala 4 atau setara dengan nilai mutu A (Sangat Baik).

4. Aspek Keuangan dan Tata Kelola BLU

a. IKU 2.1. Realisasi Pendapatan Layanan BLU

Pendapatan layanan BLU merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, jasa bank, dan pendapatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan BLU. Pendapatan ini juga tidak termasuk pendapatan yang berasal dari Rupiah Murni (RM) APBN dan hibah. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan layanan BLU adalah sebesar Rp173.703.400.580,- sehingga telah melampaui target kontrak kinerja sebesar Rp 46.703.400.580,- (atau setara dengan 137%).

Grafik 16. Pendapatan pada layanan BLU BPPP (dalam Milyar)



Pendapatan terbesar yaitu dari pelaksanaan SNBT-UTBK senilai Rp127.385.200.000,- yang disahkan pada bulan Juni 2023, sebagai pendapatan semester I.

Pendapatan kedua terbesar adalah dari UKM PPG Dalam Jabatan yaitu sebesar Rp 23.424423.000,- dan UKM PPG Pra Jabatan sebesar Rp 20.714.406.000,-.

Selain itu, pendapatan BPPP dihasilkan melalui kerja sama lain dan jasa bank/deposito selama 1 tahun, yaitu sebesar Rp 2.179.371.580,-.

Capaian pendapatan tahun 2023 yang melebihi target dipengaruhi oleh kebijakan satu pintu layanan pelaksanaan pengujian di Kemdikbud Ristek yaitu melalui BPPP, sehingga layanan ujian PPG baik untuk seleksi masuk maupun kelulusan dilakukan hanya oleh BPPP.

b. IKU 2.2. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional

Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Adapun sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran Rupiah Murni (RM) APBN dan pendapatan PNBP BLU, namun tidak termasuk penyusutan dan amortisasi. Rasio yang dihitung adalah perbandingan antara pendapatan PNBP dengan biaya operasional periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tahun 2023, skema pembiayaan pada biaya operasional terdiri dari pembiayaan RM APBN dan PNBP BLU. Adapun komposisinya dapat disajikan tabel 9.

Tabel 9. Matriks pembiayaan pada biaya operasional dari pembiayaan RM APBN dan PNBP BLU

Rincian Output/ Komponen	Biaya Operasional			Pendapatan Operasional
	RM APBN	PNBP BLU	Total	
Belanja Pegawai	1.667.495.642		1.667.495.642	
Hasil kebijakan pelaksanaan seleksi masuk PTN	1.135.478.195		1.135.478.195	
Persiapan Ujian Seleksi	27.501.978.535	14.506.549.631	42.008.528.166	
Pelaksanaan Ujian Seleksi	125.420.312.796	60.658.858.450	186.079.171.246	
Koordinasi dan Kerjasama dengan mitra lembaga	414.725.415		414.725.415	
Layanan Umum	852.961.495		852.961.495	
Operasional dan pemeliharaan kantor	2.723.879.368		2.723.879.368	
Total			234,882,239,527	173,700,600,580

Pada tahun 2023, rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional telah memenuhi kontak kinerja, yaitu sebesar 74%

c. IKU 2.3. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Modernisasi pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal dan dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu Satker yang baru terbentuk untuk mulai beroperasi pada tahun 2023, BPPP melakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi secara internal dan melalui metode swakelola tipe 2 dengan 3 (tiga) perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Strategi ini dilakukan mengingat layanan pengujian yang mendesak harus dikerjakan di tahun pertama, sehingga dituntut pemanfaatan teknologi informasi yang handal, terutama produk layanan yang berskala nasional antara lain Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru/SNPMB (web UTBK-SNBT dan SNBP). Lebih lanjut, dalam hal pengembangan diversifikasi lini bisnis BPPP, dikembangkan juga produk layanan lainnya yaitu PPG dan ABM.

Pada indikator kinerja utama ini, tahapan dan komponen yang diukur dapat dijabarkan pada matriks berikut.

Tabel 10. Matriks capaian layanan BPPP dalam tahapan dan komponen yang dilaksanakan

Tahap	Uraian dan bobot	Komponen	Target	Realisasi	Nilai Akhir
1	Integrasi Data (40%)		100	100	40,0
	a. Pengembangan web service pada tahap development Catatan: <i>Development Web UTBK dan SNBP sebagai layanan unggulan, selesai pada triwulan pertama. Sedangkan Web PPG dan ABM diselesaikan pada triwulan kedua</i>	1) Permintaan secret key development 2) Data terkirim pada server development 3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/ automation	2 10 8	2 10 8	

	<p>b. Pengembangan web service pada tahap production</p> <p><u>Catatan:</u> Tahapan ini sudah dilaksanakan melalui pendampingan swakelola pemanfaatan teknologi informasi bersama 3 PTN</p>	<p>1) Permintaan secret key production 2) Data terkirim pada server production</p>	<p>2 18</p>	<p>2 18</p>	
	<p>c. Kelengkapan pengiriman data</p> <p><u>Catatan:</u> Tahapan ini sudah dilaksanakan melalui pendampingan swakelola pemanfaatan teknologi informasi bersama 3 PTN</p>	<p>1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari 2) Kelengkapan data terkirim</p>	<p>30 30</p>	<p>30 30</p>	
2	Analitika Data (30%)		100	100	30
	<p>a. Dashboard layanan</p> <p><u>Catatan:</u> Tampilan statistik dan analitik data sudah dapat dimunculkan melalui pengembangan dashboard masing-masing layanan. Adapun akses pelihat (view only) bagi direktorat PPKBLU dapat segera dibuat menyesuaikan kebutuhan</p>	<p>1) Menampilkan kinerja layanan 2) Jumlah pengguna layanan 3) Trend pemberian layanan 4) Hasil survei pengguna layanan 5) Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU</p>	<p>12 3 3 3 9</p>	<p>12 3 3 3 9</p>	
	<p>b. Dashboard keuangan</p> <p><u>Catatan:</u> Tampilan terkait dashboard keuangan (pendapatan dan belanja) dapat dimunculkan melalui pengembangan dashboard masing-masing layanan, yang saat ini sudah tersedia sebagian. Adapun akses pelihat (view only) bagi direktorat PPK BLU dapat segera dibuat menyesuaikan kebutuhan</p>	<p>1) Menampilkan realisasi pendapatan dan belanja 2) Menampilkan jumlah posisi saldo kas 3) Menampilkan saldo rekening BLU 4) Analisis data keuangan 5) Tersedia akses bagi direktorat PPK BLU</p>	<p>6 6 6 6 6</p>	<p>6 6 6 6 6</p>	
	<p>c. Dashboard SDM</p> <p><u>Catatan:</u></p>	<p>1) Komposisi SDM 2) Profil SDM 3) Analisis kebutuhan</p>	<p>6 6 2</p>	<p>6 6 2</p>	

	<p>Saat laporan ini disusun, web SDM yang bisa dimanfaatkan adalah DikbudHR biro SDM Kemendikbudristek</p>	<p>pegawai</p> <p>4) Analisis beban kerja</p> <p>5) Analisis kinerja pegawai</p> <p>6) <i>Training need analysis</i></p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	
	<p>d. Dashboard pendukung (2 dashboard),</p>	<p>Dashboard ini dibuat berdasarkan pedoman dashboard yang ada di komponen <i>maturity rating</i></p>	<p>20</p>	<p>20</p>	
3	<p>Sistem Informasi Manajemen (20%)</p>		100	100	20
	<p>a. Sistem informasi keuangan</p> <p><u>Catatan:</u> <i>Pada tahun 2023, BPPP melakukan kerja sama dengan 5 mitra bank host-to-host untuk pembayaran SNBT-UTBK, sehingga lebih memudahkan dalam rekonsiliasi saldo penerimaan pendapatan. dalam membuat laporan pengeluaran dan saldo rekening masih dalam bentuk manual. Berdasarkan surat tinjau dari PPK BLU, BPPP diharapkan memiliki aplikasi keuangan BLU dalam jangka waktu 2 tahun setelah penetapan BLU.</i></p>	<p>1) Pencatatan penerimaan</p> <p>2) Pencatatan pengeluaran</p> <p>3) Pencatatan saldo rekening</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>8</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>8</p>	
	<p>b. Sistem informasi layanan</p> <p><u>Catatan:</u> <i>Catatan transaksi layanan utama dapat di query dari beberapa web yang dikelola secara swakelola.</i></p>	<p>1) Pencatatan transaksi layanan utama</p> <p>2) Integrasi dengan sistem keuangan</p>	<p>48</p> <p>12</p>	<p>48</p> <p>12</p>	
	<p>c. Sistem informasi SDM</p> <p><u>Catatan:</u> <i>Saat laporan ini disusun, pencatatan data SDM memanfaatkan web DikbudHR, sedangkan terkait perhitungan kinerja</i></p>	<p>1) Pencatatan data SDM</p> <p>2) Pencatatan perhitungan kinerja SDM</p>	<p>12</p> <p>8</p>	<p>12</p> <p>8</p>	

	<i>memanfaatkan web SKP milik biro SDM Kemendikbudristek</i>				
4	Website (10%)		100	100	10
	a. Performa website	1) Pengujian >40% (bobot 100%) 2) Pengujian 20% s.d. 40% (bobot 75%) 3) Pengujian <20% (bobot 50%)	40	40	
	b. Fungsi website	1) Informasi profil BLU 2) Informasi layanan BLU 3) Informasi tata kelola BLU 4) Fitur sarana pengaduan 5) Fitur survei layanan pengguna	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	
Total persentase capaian					100%
Target Kontrak Kinerja					100%

d. IKU 2.4. Persentase Penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

POS dalam kontrak kinerja adalah prosedur kerja standar yang disajikan dalam bentuk bagan arus (flowchart) yang diikuti dengan narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut. POS yang disusun oleh BPPP adalah POS yang mencakup pengelolaan keuangan dan pelaksanaan layanan. Pada tahun 2023 ini, BPPP telah menyusun POS terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Kepala BLU. Pada tahun 2023, IKU ini tidak relevan untuk diterapkan karena merupakan tahun awal sebagai BLU dan menyusun SOP BPPP.

e. IKU 2.5. Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Penyelesaian rekomendasi hasil monev dari PPK BLU adalah tindak lanjut dari saran dan masukan yang disampaikan dalam laporan Monev Direktorat PPK BLU. Adapun selama tahun 2023 dan pada saat laporan kinerja ini disusun, belum ada Monev dari Direktorat PPK BLU.

B. Realisasi anggaran

Pada tahun 2023, BPPP berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penugasan sumber daya manusia (baik internal maupun eksternal). Selanjutnya hasil efisiensi tersebut digunakan untuk menambah output pada kegiatan-kegiatan prioritas. Sehingga output-output tersebut dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada akhirnya hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penugasan SDM tersebut tercermin dalam harga satuan realisasi kegiatan lebih rendah/efisien daripada harga satuan yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perbandingan Harga Satuan Output Kegiatan

No	Output Kegiatan	Rencana			Realisasi			Efisiensi
		Volume	Anggaran	Harga Satuan	Volume	Anggaran	Harga Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	1.470.000	233.702.263.000	158.981	2.805.707	228.502.433.827	81.442	77.539
2.	Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	1	1.883.270.000	1.883.270.000	2	1.135.478.195	567.739.098	1.315.530.900
3.	Nilai NKA (Layanan Umum dan Layanan Perkantoran)	90	6.080.000.000		95,59	5.244.336.505		
	Tanpa Perhitungan Blokir		241.665.533.000					
	Dengan Blokir		241.665.533.000					

Berdasarkan tabel di atas, rerata nilai efisiensi anggaran BPPP sekitar 59%, yang dapat dimaknai bahwa sepanjang tahun anggaran 2023 upaya optimalisasi anggaran telah dapat dilakukan dengan baik, sehingga sasaran yang diharapkan dapat terlampaui.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Kolaborasi/Crosscutting

Pada tahun 2023, BPPP membuat inovasi dengan meluncurkan Asesmen Bakat Minat (ABM) jenjang SMA sederajat. Berbeda dengan ABM jenjang SMP sederajat yang menggali bakat dan peminatan peserta didik dalam rangka penyesuaian penentuan tujuan jenjang sekolah berikutnya (SMA atau SMK), ABM jenjang SMA sederajat membantu peserta didik dalam menentukan keahlian atau kompetensi apa yang relevan dengan bakat minatnya sehingga dapat lebih mudah mengambil keputusan saat memilih Perguruan Tinggi akademik atau Perguruan Tinggi Vokasi. Diharapkan setelah memasuki jenjang perguruan tinggi, mahasiswa yang sudah terpetakan bakat dan minatnya mampu memiliki motivasi dan daya juang (*resilience*) yang cukup kuat dalam menyelesaikan studinya..

Program ini selaras dengan proses bisnis BPPP terkait Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), terutama dalam memetakan potensi kompetensi peserta didik dan realisasi saat mendaftarkan diri dalam SNPMB yang akan terkait dengan keberlanjutan jenjang karir profesionalnya. Pada asesmen bakat dan minat digali tujuh bakat dasar yaitu: verbal, mekanik, klerikal, penalaran, kuantitatif, spasial, dan penggunaan bahasa. Bakat diukur menggunakan tes yang bersifat kognitif dan terdiri dari soal-soal obyektif. Sedangkan asesmen minat menggunakan pertanyaan berbentuk likert untuk mengukur kecenderungan pilihan. secara umum minat dibedakan menjadi minat metadis yang menunjukkan kesukaan terhadap pengembangan teori serta minat praktis yang menunjukkan kesukaan terhadap keterampilan dan praktik. seseorang yang minat metadisnya lebih menonjol akan lebih sesuai melanjutkan ke universitas ataupun institut dengan program sarjana. sebaliknya minat praktis yang menonjol akan relevan untuk melanjutkan ke politeknik.

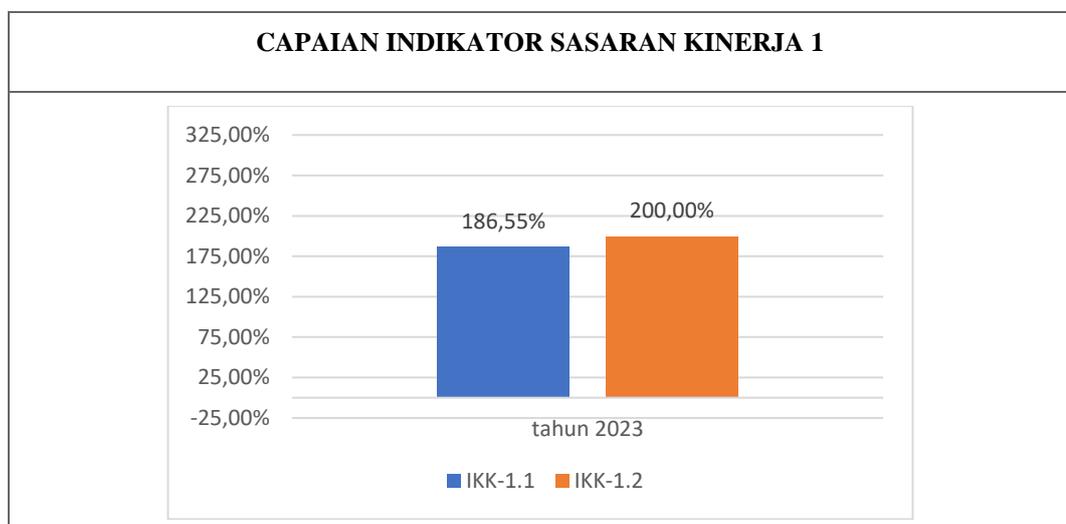
BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2023, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja, maupun Kontrak Kinerja sebagai Badan Layanan Umum. Berikut ini disampaikan ringkasan pencapaian indikator kinerja selama tahun 2023.

Capaian Kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan tahun 2023 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pengelola Pengujian Pendidikan tahun 2023-2028. Pada capaian kinerja berdasarkan sasaran kinerja beserta target indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut.

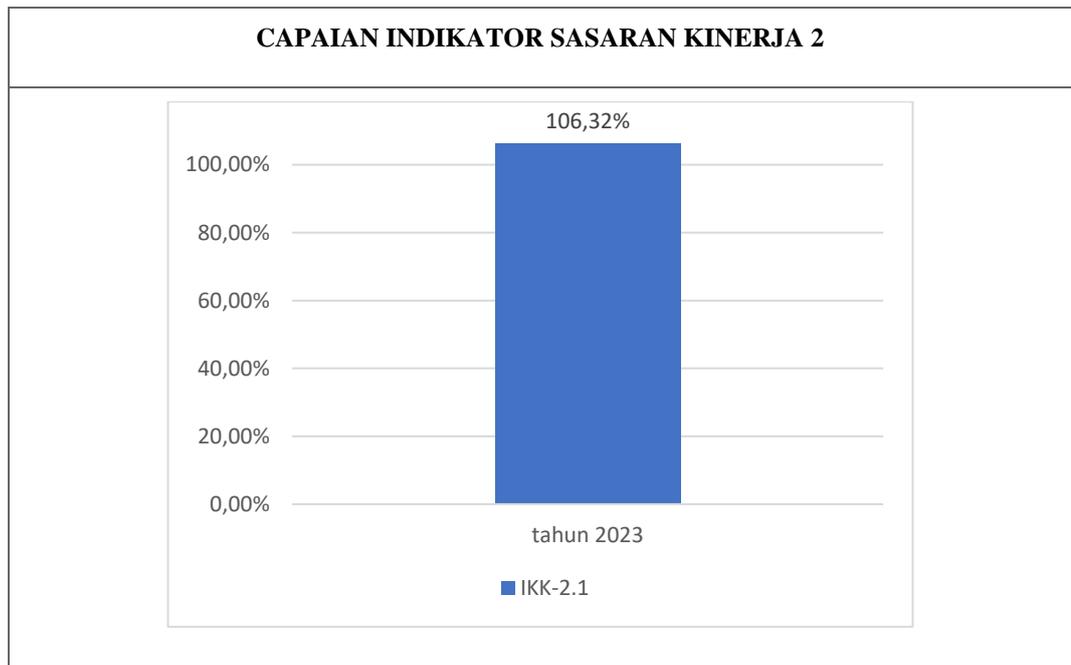
1. Sasaran kinerja 1 “Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan”. Dengan target tahun 2023 untuk indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas” sebesar 119 satuan pendidikan, telah dilayani pelaksanaan asesmen pendidikan pada 222 satuan pendidikan (186,55%). Sedangkan target tahun 2023 untuk indikator kinerja “Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen” sebesar 1 rekomendasi, telah dihasilkan 2 rekomendasi bahan kebijakan (200%).

Grafik 17. Capaian Indikator Sasaran Kinerja 1



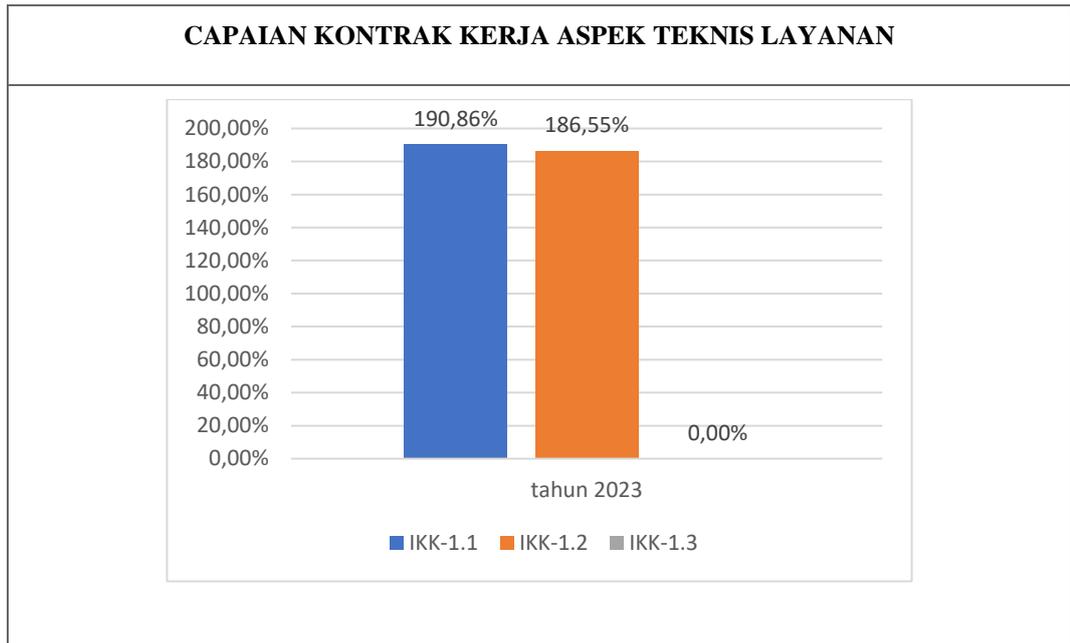
2. Sasaran kinerja 2 “Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan”. Dengan target tahun 2023 untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan” sebesar 90. poin, telah dicapai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 95,69 poin (106,32%).

Grafik 18. Capaian Indikator Sasaran Kinerja 1

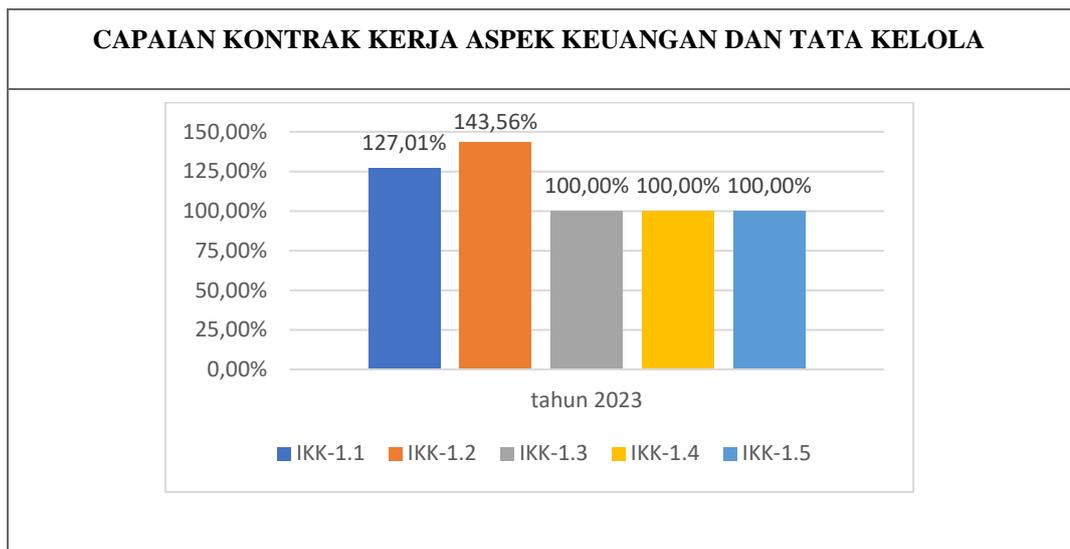


Sebagai Badan Layanan Umum, pada tahun 2023 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan telah mencapai target kontrak kerja sebagai berikut.

Grafik 19. Capaian Kontrak Kerja Aspek Teknis Layanan



Grafik 20. Capaian Kontrak Kerja Aspek Keuangan dan Tata Kelola



Keberhasilan tersebut merupakan dasar bagi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi pada tahun ini akan menjadi bahan pembelajaran, dan terus dilakukan perbaikan dan

penyempurnaan secara berkesinambungan agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1) Penambahan sumber daya manusia di BPPP. Volume anggaran, cakupan program kerja dan sifat pekerjaan yang berdampak nasional memerlukan jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Modernisasi pengelolaan PNBPN sebagai satker BLU. Pengelolaan pendapatan, belanja maupun investasi memerlukan dukungan sistem informasi yang berbasis teknologi dan terintegrasi.
- 3) Layanan pengujian pendidikan yang terjadwal dengan pasti beserta estimasi jumlah peserta yang akurat. hal ini membantu perencanaan program serta anggaran yang baik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

- 1) Penambahan jumlah SDM sekaligus peningkatan kapasitas SDM.
- 2) Adopsi sistem pengelolaan BLU yang modern dan terintegrasi.
- 3) Koordinasi kemitraan untuk dapat merencanakan layanan pengujian pendidikan dengan lebih baik dan terarah.

Dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, serta sumberdaya yang ada, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 di bidang pendidikan optimis dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1: Perjanjian Kinerja



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Anindito Aditomo

Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan,**



Anindito Aditomo

**Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan,**



Rahmawati



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	119
		[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	1
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	90



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2029	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan	Rp. 200.000.000.000
2	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp. 6.635.841.000
		TOTAL	Rp. 206.635.841.000

Jakarta, 30 Januari 2023

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan,**

**Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan,**



Anindito Aditomo



Rahmawati



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Anindito Aditomo

Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Desember 2023

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan,**



Anindito Aditomo

**Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan,**



Rahmawati

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	119
		[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	1
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	-
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	90

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2029	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan	Rp. 235.585.533.000
2	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp. 6.080.000.000
		TOTAL	Rp. 241.665.533.000

Jakarta, 15 Desember 2023

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan,**



Anindito Aditomo

**Kepala Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan,**



Rahmawati

LAMPIRAN-2: Kontrak Kinerja BLU

 <small>KEMENTERIAN KEUANGAN</small>	<p>KONTRAK KINERJA ANTARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DENGAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI TAHUN 2023</p>	 <small>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</small>																															
<p>Nomor : 000 - 270 / PB / 2023 Nomor : 713/H4.1/KU/III/2023</p>																																	
<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>																																	
<p>1. Nama : Astera Primanto Bhakti Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA</p>																																	
<p>2. Nama : Rahmawati Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA</p>																																	
<p>Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:</p>																																	
<p>1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Aspek</th> <th style="width: 50%;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td rowspan="3">Aspek Teknis Layanan</td> <td>Realisasi jumlah peserta pengujian Pendidikan</td> <td style="text-align: center;">1.470.000 orang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Realisasi jumlah mitra layanan pengujian Pendidikan</td> <td style="text-align: center;">120 lembaga</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Indeks kepuasan pengguna layanan</td> <td style="text-align: center;">3 (skala 1-4)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td rowspan="4">Aspek Keuangan dan Tata Kelola</td> <td>Realisasi Pendapatan Layanan BLU</td> <td style="text-align: center;">Rp121.875.000.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional</td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Persentase Penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td></td> <td>Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Aspek	Indikator Kinerja Utama	Target	1.	Aspek Teknis Layanan	Realisasi jumlah peserta pengujian Pendidikan	1.470.000 orang	2.	Realisasi jumlah mitra layanan pengujian Pendidikan	120 lembaga	3.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3 (skala 1-4)	4.	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi Pendapatan Layanan BLU	Rp121.875.000.000	5.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional	65%	6.	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	7.	Persentase Penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	100%	8.		Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	80%	<p>2. PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.</p> <p>3. PIHAK PERTAMA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.</p>	
No.	Aspek	Indikator Kinerja Utama	Target																														
1.	Aspek Teknis Layanan	Realisasi jumlah peserta pengujian Pendidikan	1.470.000 orang																														
2.		Realisasi jumlah mitra layanan pengujian Pendidikan	120 lembaga																														
3.		Indeks kepuasan pengguna layanan	3 (skala 1-4)																														
4.	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi Pendapatan Layanan BLU	Rp121.875.000.000																														
5.		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional	65%																														
6.		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%																														
7.		Persentase Penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	100%																														
8.		Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	80%																														
<p>Jakarta, 31 Maret 2023</p>																																	
<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Astera Primanto Bhakti</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p>   <p>Rahmawati</p>																																

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

1. Realisasi Jumlah Peserta Pengujian Pendidikan

Sasaran Strategis	: Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Jumlah Peserta Pengujian Pendidikan
Deskripsi	: Jumlah Peserta Pengujian Pendidikan merupakan adalah peserta perorangan masyarakat yang mendapatkan layanan atas kebutuhan pengujian Pendidikan dan hasil ujian individu yang dilaksanakan berdasarkan adanya PNPB BLU.
Formula	: Jumlah Peserta Pengujian Pendidikan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tujuan	: Memberikan layanan yang prima kepada Peserta Pengujian Pendidikan sebagai layanan utama dari BLU.
Satuan Pengukuran	: Jumlah Peserta Pengujian Pendidikan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Jumlah Pendaftar Pengujian Pendidikan

2. Realisasi Jumlah Mitra Layanan Pengujian Pendidikan

Sasaran Strategis	: Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Jumlah Mitra Layanan Pengujian Pendidikan
Deskripsi	: Jumlah Mitra Layanan Pengujian Pendidikan merupakan jumlah Lembaga yang mendapatkan layanan pengujian Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan adanya PNPB BLU.
Formula	: Jumlah Mitra Layanan Pengujian Pendidikan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tujuan	: Memberikan layanan yang prima kepada Mitra Layanan Pengujian Pendidikan sebagai layanan utama dari BLU.
Satuan Pengukuran	: Jumlah Mitra Layanan Pengujian Pendidikan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Jumlah Mitra Layanan Pengujian Pendidikan

3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Sasaran Strategis	: Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Deskripsi	: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

	Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.			
Formula	Hasil pengukuran IKM			
	Indeks Kuantitatif		Kualitatif	
	Skala 1 - 4	Skala 1 - 100	Mutu Pelayanan	Predikat
	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan			
Satuan Pengukuran	Angka Indeks			
Jenis Konsolidasi Periode	Take Last Known Value			
Polarisasi Indikator Kinerja	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)			
Periode Pelaporan	Tahunan			
Sumber Data	Laporan Hasil Survey Pengukuran IKM			

4. Realisasi Pendapatan Layanan BLU

Sasaran Strategis	: Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Pendapatan Layanan BLU
Deskripsi	: PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN dan hibah
Formula	: Jumlah seluruh PNBP BLU yang disahkan ke Kuasa BUN sebagai pendapatan BLU, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tujuan	: Untuk mendorong Pemimpin BLU agar meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU
Satuan Pengukuran	: Nilai Rupiah (Rp)
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan, Aplikasi SPAN/OMSPAN

5. Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Biaya Operasional

Sasaran Strategis	: Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern
Indikator Kinerja Utama	: Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional
Deskripsi	: Rasio POBO merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan biaya operasional untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Formula	: $\text{Rasio POBO} = \frac{\text{Realisasi PNBP Tahun Bersangkutan}}{\text{Realisasi Biaya Operasional Tahun Bersangkutan}} \times 100\%$
	Penjelasan
	a. PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang

	tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan an berasal dari RM APBN b. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNPB BLU, tidak termasuk penyusutan, dan amortisasi.
Tujuan	: IKU ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemandirian BLU di dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Selain itu juga untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU dan meningkatkan cost effectiveness dan cost efficiency sehingga kegiatan dapat dibiayai dari PNPB.
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan (Laporan Operasional)

6. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Aspek Kinerja	: Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern																																
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU																																
Tujuan	: Mengukur tingkat modernisasi BLU dalam rangka peningkatan layanan, akuntabilitas manajemen dan pemanfaatan data dalam rangka pengambilan keputusan (decision support system).																																
Deskripsi	: Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.																																
Fomula	: <p><i>Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU</i> = <i>Persentase Penyelesaian Tahapan + Capaian Tambahan</i></p> <p>Penyelesaian Tahapan: Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) tahapan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahap</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot per tahapan</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">I</td> <td>Integrasi Data</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Permintaan secret key development</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Data terkirim pada server development</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Pengembangan webservice pada Tahap Production</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Permintaan secret key production</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Data terkirim pada server production</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahap	Uraian	Bobot per tahapan	Nilai	I	Integrasi Data		40%	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development			1) Permintaan secret key development	2		2) Data terkirim pada server development	10		3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation	8		b. Pengembangan webservice pada Tahap Production				1) Permintaan secret key production	2			2) Data terkirim pada server production	18		
Tahap	Uraian	Bobot per tahapan	Nilai																														
I	Integrasi Data		40%																														
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development																																
	1) Permintaan secret key development	2																															
	2) Data terkirim pada server development	10																															
	3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation	8																															
b. Pengembangan webservice pada Tahap Production																																	
1) Permintaan secret key production	2																																
2) Data terkirim pada server production	18																																

Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dapat diperhitungkan setelah capaian kinerja atas Persentase Penyelesaian Tahapan tercapai 100%. Capaian Tambahan dihitung berdasarkan kriteria Kecepatan Penyelesaian masing-masing tahapan (max. 20%) dan extra miles (max. 30%):

Kecepatan Penyelesaian:

Kecepatan penyelesaian dibagi menjadi 4 (empat) range waktu penyelesaian.

Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target Penyelesaian	Bobot Capaian
Triwulan I	Tahap I	100%	40%
Triwulan II	Tahap I dan IV	100%	50%
Triwulan III	Tahap I, III, dan IV	100%	70%
Triwulan IV	Tahap I s.d. IV	100%	100%

Khusus untuk Indikator "Integrasi Data" (Tahap I), capaian kecepatan dapat diklaim jika sudah selesai pengembangan di server production dan endpoint data yang dikirimkan telah lengkap minimal selama 1 Triwulan.

Kecepatan capaian dihitung secara proporsional sebagai berikut :

Uraian	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Integrasi Data	100%	75%	50%	25%
Website	100%	100%	75%	50%
Sistem Informasi Manajemen	100%	100%	100%	75%
Analitika Data	100%	100%	100%	100%

Capaian Tambahan Kecepatan Penyelesaian dihitung sebagai berikut:

Kecepatan Penyelesaian	Penilaian Capaian
Bobot Capaian < 100%	Sesuai % dari target
Bobot Capaian = 100%	20%

Extra Miles:

Extra Miles merupakan capaian tambahan yang mendukung capaian indikator utama. Capaian Tambahan Extra Miles dihitung sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Extra Miles	Nilai
1	Integrasi Data	Kelengkapan Jangka Waktu Pengiriman Data	12%
2	Analitika Data	SDM / Bagian di bidang Analisis Data Analisis data pada level Prediktif / Preskriptif	8%
3	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6%
4	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4%
Total capaian Extra Miles			30%

Tujuan	: IKU ini untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya BLU dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: 1. Data pada BIOS 2. Sistem Informasi pada BLU 3. Data Primer sebagai bahan uji dan pembending

7. Persentase Penetapan POS Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Sasaran Strategis	: Terwujudnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang baik
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penetapan SOP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
Deskripsi	: POS dalam kontrak kinerja ini adalah prosedur kerja standard yang disajikan dalam bentuk bagan arus (flowchart) yang diikuti dengan narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut. Format POS mengikuti ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun POS yang akan ditetapkan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan mencakup POS Pengelolaan Keuangan dan POS Pelaksanaan Layanan
Formula	: $\frac{\text{POS BPPP yang telah ditetapkan}}{\text{POS BPPP yang harus ditetapkan}} \times 100\%$
Tujuan	: IKU ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola BLU yang baik, transparan dan akuntabel
Satuan Pengukuran	: %
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: POS Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

8. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sasaran Strategis	: Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel
Indikator Kinerja Utama	: Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi
Deskripsi	: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPK BLU, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Formula	: Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPK BLU, dihitung sebagai berikut : $= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi}}{\text{Jumlah temuan hasil monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsibilitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.

Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	<ul style="list-style-type: none">- Laporan tindak lanjut di BIOS- Hasil verifikasi dari Direktorat PPKBLU

LAMPIRAN-3: Pengukuran Kinerja



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	Satuan Pendidikan	119	TW1 :	TW1 : 119
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	Rekomendasi Kebijakan	1	TW1 :	TW1 : 0
1	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Predikat	-	TW1 :	TW1 : 1
1	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Nilai	90	TW1 :	TW1 : 1

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.206.635.841.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 10 Mei 2023 sebesar **Rp. 131.552.673.843** atau **63.66%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 10 Mei 2023 **Rp. 75.083.167.157**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.1 Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan swakelola Kegiatan Sosialisasi dan Promosi, serta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun 2023 pada 119 PTN dengan jumlah peserta 663.181 peserta

Kendala / Permasalahan :

Terdapat beberapa PTN mengalami kendala pelaksanaan dikarenakan waktu pelaksanaan yang relatif padat, serta terdapat PTN yang tidak dapat melaksanakan kegiatan swakelola dikarenakan kendala komunikasi dan koordinasi dengan tim pelaksana pusat

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kegiatan dari sisi PTN dan tim pelaksana pusat. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan pada PTN dengan kendala tertentu.

B . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.2 Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen

Progress / Kegiatan :

Kegiatan belum terlaksana di periode triwulan I dan akan dilaksanakan mulai Juni 2023

Kendala / Permasalahan :

Belum terdapat kendala dikarenakan kegiatan yang belum dilaksanakan

Strategi / Tindak Lanjut :

Mulai mempersiapkan pelaksanaan baik dari segi teknis dan non-teknis dikarenakan sudah mendekati waktu pelaksanaan

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU Kemenkeu terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP-TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU Kemenkeu terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP-TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Capaian kinerja satuan pendidikan yang mendapatkan layanan pengujian pendidikan perlu dikaitkan dengan jumlah peserta layanan pengujian pendidikan. sehingga sebagai lampiran akan ada tabel jumlah peserta untuk setiap satuan pendidikan

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 10 Mei 2023

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



Rahmawati



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	Satuan Pendidikan	119	TW2 :	TW2 : 9
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	Rekomendasi Kebijakan	1	TW2 :	TW2 : 0
1	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Predikat	-	TW2 :	TW2 : 1
1	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Nilai	90	TW2 :	TW2 : 1

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.283.485.674.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 19 Juli 2023 sebesar **Rp. 176.929.454.658** atau **62.41%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 19 Juli 2023 **Rp. 106.556.219.342**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.1 Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan swakelola Kegiatan Sosialisasi dan Promosi, serta Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Tahun 2023 pada 74 Pusat UTBK dengan jumlah peserta 803.853, kemitraan pengujian dengan pihak eksternal seperti TNI dan POLRI di bawah Kemenhan, serta Politeknik Pariwisata di bawah Kemenparekraf

Kendala / Permasalahan :

Terdapat perubahan nilai kontrak dikarenakan adanya perbedaan estimasi dan realisasi peserta UTBK yang mendaftar

Strategi / Tindak Lanjut :

Adanya adendum nilai kontrak

B . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.2 Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen

Progress / Kegiatan :

Kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan II

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala atau permasalahan

Strategi / Tindak Lanjut :

Tidak ada strategi atau tindak lanjut atas kendala atau permasalahan

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU, KPPN, dan Kanwil terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU).

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP/TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU Kemenkeu terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP-TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

3. REKOMENDASI PIMPINAN

setelah BPPP menjadi blu, maka diversifikasi layanan harus dilakukan dan terefleksi dari peningkatan jumlah mitra layanan pengujian pendidikan serta jumlah peserta pengujian pendidikan yang mendapatkan layanan profesional kredibel serta akuntabel

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 19 Juli 2023

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



Rahmawati



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	Satuan Pendidikan	119	TW3 : 0	TW3 : 128
2	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	Rekomendasi Kebijakan	1	TW3 : 0	TW3 : 1
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Predikat	-	TW3 : 0	TW3 : 3
4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Nilai	90	TW3 : 0	TW3 : 3

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.241.665.533.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 18 Oktober 2023 sebesar **Rp. 200.502.976.303** atau **82.97%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 18 Oktober 2023 **Rp. 41.162.556.697**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.1 Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan Swakelola Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2023 memasuki masa akhir pelaksanaan kontrak per 30 September 2023 dengan capaian 803.853 peserta pengujian pendidikan yang terlayani. Pelaksanaan ujian Pendidikan Profesi Guru (PPG) per 25 Juli 2023 sejumlah 285.326 peserta

Kendala / Permasalahan :

Terdapat kendala proses penyelesaian laporan penggunaan dana kontrak UTBK-SNBT 2023 dikarenakan pelaksanaan yang menggunakan 2 sumber dana yang berbeda yaitu Rupiah Murni (RM) dan Badan Layanan Umum (BLU)

Strategi / Tindak Lanjut :

Laporan penggunaan dana disesuaikan dengan sumber dana yang digunakan beserta realisasinya, terkait sisa dana akan dilakukan pengembalian sesuai sumber dananya, jika pengembalian atas dana RM akan melalui penerbitan ID Billing (Kas Negara) dan pengembalian sisa dana BLU melalui penerbitan VA (rekening BLU)

B . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.2 Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan analisis terkait kebijakan dan evaluasi selama pelaksanaan SNPMB 2023 antara lain kajian tentang latar belakang sosial-ekonomi peserta, latar belakang jurusan/peminatan saat SLTA, penrapan subtes pada pelaksanaan SNBT, data rapor tiap semester, relevansi data indeks sekolah dan keterisian kuota program studi diploma

Kendala / Permasalahan :

Terdapat perbedaan signifikan untuk keterisian kuota program studi diploma lebih rendah daripada program sarjana, kenaikan data nilai rapor yang cukup signifikan dari semester 4 ke semester 5 saat SLTA

Strategi / Tindak Lanjut :



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Keterisian kuota program diploma dengan pertimbangan penambahan pilihan program studi pada 2024 untuk meningkatkan keterisian program diploma, pertimbangan untuk mempertahankan subtest karena relevan untuk penerapan ujian seleksi, pertimbangan penggunaan data literasi-numerasi asesmen nasional selain indeks sekolah

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU, KPPN, dan Kanwil terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU).

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP/TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU Kemenkeu terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP-TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Nilai kinerja anggaran perlu ditingkatkan. perhatikan tanggal kontrak, pemenuhan dokumen kontrak sesuai tenggat waktu. SPM serta SPJ kegiatan tidak melebihi 3 pekan dari tanggal realisasi kegiatan. selain itu pemasukan BLU segera dilakukan rekonsiliasi dan dilaporkan pengesahan pendapatan

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 18 Oktober 2023

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



Rahmawati



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN s.d Bulan Januari Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	Satuan Pendidikan	119	TW4 : 119	TW4 : 231
2	[SK 1.0] Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen	Rekomendasi Kebijakan	1	TW4 : 1	TW4 : 2
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Predikat	-	TW4 : 0	TW4 :
4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RCA-KL Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Nilai	90	TW4 : 90	TW4 :

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.241.665.533.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 08 Januari 2024 sebesar **Rp. 242.768.011.597** atau **100.46%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 08 Januari 2024 **Rp. -1.102.478.597**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.1 Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas

Progress / Kegiatan :

Memasuki masa akhir tahun anggaran terdapat pelaksanaan UKM PPG PPG Dalam Jabatan dan Tes Substantif PPG Pra jabatan pada periode November hingga Desember 2023 dengan total melayani 62.634 peserta ujian

Kendala / Permasalahan :

Terdapat kendala proses penyelesaian laporan penggunaan dana serta administrasi kontrak pelaksanaan ujian PPG dikarenakan timeline yang cukup singkat antar jadwal pelaksanaan ujian

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan percepatan proses penyelesaian laporan hingga administrasi lainnya dengan follow up dan tindak lanjut sesuai permasalahan yang terjadi di setiap mitra

B . SK 1.0 Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan

- IKK 1.2 Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan analisis terkait kebijakan dan evaluasi selama pelaksanaan SNPMB 2023 dan Ujian PPG 2023. Dilakukan kajian mengenai: - Hubungan antara faktor demografi dan faktor lain terhadap kelulusan UKMPPG Prajabatan dan UKMPPG Dalam Jabatan - Profil hasil uji kinerja dan uji tertulis peserta PPG serta konsistensi penilaian antar asesor pada setiap rubrik - Faktor yang dominan yang menentukan kelulusan peserta UKMPPG dan faktor yang berpengaruh terhadap hasil PCK pada UKMPPG Prajab dan ujian pengetahuan terhadap hasil UKMPPG Daljab

Kendala / Permasalahan :

Terdapat beberapa data yang masih belum bisa ditarik untuk bahan analisis, seperti status guru daljab (PNS/Tidak), NIP guru PNS, dan lain-lain

Strategi / Tindak Lanjut :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Penilaian terhadap portofolio perlu ditinjau ulang mengingat subjektivitas penilai cukup besar - Sosialisasi/pelatihan bagi penilai terhadap pemahaman rubrik penilaian RPP dan PP diperbaiki agar konsistensi kedua penilai lebih meningkat - Beberapa kriteria calon PPG Prajabatan tetap dipertahankan - Perlu dilakukan masukan kepada PT penghasil sarjana Pendidikan PAUD dan BK pada umumnya bahwa peserta dari kedua kelompok ini terjadi ketidakhadiran tertinggi pada UKMPPG Prajabatan - Sosialisasi/pelatihan bagi penilai terhadap pemahaman uji penilaian studi kasus dan uji kinerja diperbaiki agar tidak terjadi gap penilaian kedua penilai secara signifikan
- perlu dilakukan evaluasi terhadap rubrik-rubrik tertentu dalam penilaian UKMPPG Prajab yang pengaruhnya tidak terlalu besar untuk mampu membedakan tingkat kelulusan peserta

C . SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU, KPPN, dan Kanwil terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU).

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP/TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sertaterdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

D . SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait tata kelola BPPP seperti koordinasi dengan PPK-BLU Kemenkeu terkait proses administrasi setelah penetapan sebagai satker Badan Layanan Umum

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pengelolaan UP-TUP dan tagihan kontraktual dikarenakan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan serta terdapat proses buka blokir anggaran. Kendala selama masa persiapan pengajuan sebagai satker BLU dikarenakan masih terbatasnya jenis satker yang melakukan tugas-fungsi serupa sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola

Strategi / Tindak Lanjut :

Mempertimbangkan kembali terkait waktu pelaksanaan kegiatan/program. Berkoordinasi dengan mitra dan lembaga terkait perihal pelaksanaan tata kelola sebagai satker BLU

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Pengelolaan administrasi dan keuangan perlu ditingkatkan. Penambahan jumlah SDM keuangan juga kapasitas SDM yg relevan dengan bidang keuangan menjadi urgen. Selain itu, penggunaan aplikasi tata kelola keuangan BLU menjadi prioritas 2024

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 08 Januari 2024

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



Rahmawati



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen .

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2024

Ketua Tim Reviu,



Ellis Darmayanti, S.E. M.M.

NIP. 198002062010122002